

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui
Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SANIYAH

NPM : 1551010287

Jurusan : Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/ 2019M**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui
Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SANIYAH

NPM : 1551010287

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A.,M.Ec.Dev

Pembimbing II : Ghina Ulfa Saefurrahman, LC., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif masyarakat. Kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu: untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada BUMDes di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertempat di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 311 KK yang ada di 4 dusun Desa Sukaraja Ulu Krui. Sedangkan sample dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi yaitu berjumlah 31 KK, dengan metode pengambilan sample yaitu *Random Sampling*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik mengolah data melalui 3 tahapan yakni pemeriksaan (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistematisasi data (*systematizing*). Analisa data menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes Kilu Angkon itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (pelengkap).

Kata kunci: BUMDes, Peran, dan Kemiskinan



KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon Di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)

Nama

: Saniyah

NPM

: 1551010287

Jurusan

: Ekonomi Syari'ah

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev.

NIP.197809182005012005

Pembimbing II

Ghina Ulfa Saefurrahman, L.C., M.E.Sy.

NIP.198708122019032012

Ketua

Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BUMDES KILU ANGKON DESA
SUKARAJA ULU KRUI KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN
PESISIR BARAT)”** disusun oleh **Saniyah, NPM 1551010287, Program Studi
Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Selasa, 12
November 2019**

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang : Madnasir, S.E.,M.Si


(.....)

Sekretaris sidang : Dimas Pratomo, S.E.I.,M.E


(.....)

Penguji I : Deki Fermansyah, S.E.,M.Si


(.....)

Penguji II : Ghina Ulfa S. L.c.,M.E.Sy


(.....)

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I

NIP.198008012003121

MOTTO

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat

yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹

(QS. Al-Anfal (8) : 53)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 185

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, seiring rasa syukur dan kerendahan hati karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabarannya yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dengan do'a, moral dan material dan segenap jasa-jasanya yang tak terhitung serta tak henti-hentinya mendoakan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Senyum dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Untuk adiku dan keluarga besarku yang telah turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Teman-temanku yang selalu mendampingi dan memberi semangat dalam setiap proses pembuatan skripsi ini.
4. Almamaterku UIN raden intan lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Saniyah dilahirkan di Pekon Napal pada tanggal 13 April 1998, anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Saleh dan Juwairiah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Pekon Napal dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Abdurrahman Ibnu Auf Bandar Lampung selesai tahun 2012, Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) 57 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1436H/2015M.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019

Penulis

Saniyah

1551010287

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para ulama yang senantiasa beristiqomah berada di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperandalam proses penyelesaian. Serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ruslan A.Ghofur, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si, dan Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Vitria Susanti, M.A.,M.Ec.Dev selaku pembimbing I, dan Ibu Ghina Ulfa Saefurrahman, LC.,M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam pencerahan, mendidik serta menularkan pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini;
5. Sahabat-sahabatku tersayang Betty Karlina.S.E, Desi Markena.S.E, Marlina Anggraini.S.E, Elsa Susanti.S.E, Sesi Enjel.S.E, Nurul Hidayati.S.H, Taufik Hidayat.S.E, dan Ari Widiyanto.S.E yang selama ini menjadi teman/sahabat/keluarga yang solid dalam bertukar gagasan dan berbagi keluh kesah dalam suka maupun duka, yang tak pernah berhenti memberiku motivasi dan nasehat.
6. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam E dan seluruh angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung;

7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan dalam menulis skripsi. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amiiin. Saya berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan penyempurnaan penelitian selanjutnya khususnya Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam.

2019

Bandar Lampung, 17 Juli

Penulis

Saniyah

1551010287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Desa dan Pembedayaan Masyarakat	22
--	----

1. Pembangunan Desa	22
2. Otonomi Desa	25
3. Pemberdayaan masyarakat	27
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	31
1. Pengertian BUMDes	31
2. Tujuan dan Fungsi BUMDes	33
3. Peranan BUMDes.....	35
4. Dasar Hukum BUMDes	36
5. Pengurus dan Pengelolaan BUMDes	36
6. Keuangan BUMDes	38
7. Pertanggungjawaban BUMDes.....	39
8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	39
9. Pembagian Keuntungan	41
C. Kemiskinan	41
1. Definisi Kemiskinan	41
2. Indikator Kemiskinan	44
3. Kemiskinan perspektif ekonomi islam.....	47
D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	49
1. Kesejahteraan Secara Umum	49
2. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam	50
3. Indikator Kesejahteraan	54
E. Mengentaskan kemiskinan pespektif ekonomi islam.....	62
1. Kewajiban bekerja dalam islam.....	62

F. Telaah pustaka.....	66
G. Kerangka berfikir.....	71

BAB III Laporan Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
1. Sejarah Singkat Desa Sukaraja Ulu Krui.....	73
2. Keadaan Wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui.....	74
3. Keadaan Demografis Desa Sukaraja Ulu Krui.....	75
B. Gambaran Umum BUMDes Kilu Angkon.....	80
1. Organisasi.....	80
2. Tujuan Pembentukan Bumdes Kilu Angkon.....	81
3. Struktur Kepengurusan Bumdes Kilu Angkon.....	82
4. Visi Misi Bumdes Kilu Angkon.....	86
5. Unit Kegiatan Usaha BUMDes Kilu Angkon.....	86
a. Unit Usaha Konstruksi	86
b. Unit Usaha Sektor iil	87
c. Unit Usaha Peminjaman Modal	90
C. Peran BUMDes Kilu Angkon.....	91

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui.....	98
B. Pola Pengelolaan BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui	120
C. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui Perspektif Ekonomi.....	127

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	138
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui.....	9
3.1	Pejabat Desa Sukaraja Ulu Krui	74
3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	76
3.3	Tingkat pendidikan penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui.....	77
3.4	Mata Pencarian Pokok Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui	78
3.5	Rata-rata Pendapatan Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui.....	79
3.6	Kondisi Perumahan Desa Sukaraja Ulu Krui.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Pra Riset

Lampiran 3 : Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Panduan Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Surat Konsultasi Pembimbing Akademik

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di maksud.

Adapun judul skripsi ini “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat) Adapun istilah istilah tersebut adalah:

1. Peran

Peran bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa.²

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tgl 1 Desember 2018 Jam 22:15 wib.

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.³

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan (falah) merupakan tujuan utama syari'ah, yang terletak pada perlindungan agama (iman), jiwa (hidup), akal, keturunan dan harta. Apasaja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum yang dikehendaki.⁴ Pada salah satu publikasi PBB tahun 1961 yang berjudul *Internasional Definition And Measurement Of Levels Of Living In Interim Guide* dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi,

³ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

⁴ M. Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Nur Hadi Ihsan Dan Rifki Amar (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h. 1

pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.⁵

4. Perspektif

Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.⁶

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah merupakan sekumpulan norma hukum yang bersumber dari AL-Quran dan AL-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.⁷

Berdasarkan uraian penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik desa dalam pengentaskan kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subjektif sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan yang berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu

⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 305

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Empat, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2005) h. 379

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008), h. 4

pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah dijalankan masyarakat desa Desa Sukaraja Ulu Krui sejak tahun 2016, dengan jenis unit usaha yaitu unit usaha sektor riil (bidang jasa pelayanan), unit usaha bidang konstruksi (penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung) dan unit usaha peminjaman modal. Akan tetapi keberadaan BUMDes di masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi kemiskinan di Desa tersebut.⁸

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui peran dari adanya Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaraja Ulu Krui dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mengapa BUMDes yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui belum bisa meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

2. Secara Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan pihak pemerintah Pekon Sukaraja Ulu Krui tentang badan usaha milik desa dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Pekon Sukaraja Ulu Krui. Judul ini memberikan penambahan dan

⁸Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

pengembangan wawasan baik bagi penulis, pembaca, ataupun Badan Usaha Milik Desa yang ada di Pekon Sukaraja Ulu Krui.

- b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswi Ekonomi Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah

C. Latar Belakang Masalah

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.⁹ Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.¹⁰

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu

⁹Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 295-299.

¹⁰M.J Kasianto, *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia* , (Jakarta: Pt Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), H. 55

belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa yang melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.¹¹

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kawenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat

¹¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari (2014)

desa.¹² keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh

¹² Edy yusuf agunggunanto dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes)*, vol 13 no 1 (2016)

kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.¹³

Di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Kecamatan Way Krui terdapat 10 Desa/Kelurahan. Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Way Krui. Desa Sukaraja Ulu Krui dengan luas wilayah 750 Ha memiliki jumlah penduduk sebanyak 1968 jiwa. Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman pangan merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk.

Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula dan telah memiliki BUMDes didalamnya, Badan Usaha Desa Sukaraja Ulu Krui ini didirikan pada 04 April 2016 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Kilu Angkon. Dari hasil survey pengamatan penelitian tentang BUMDes di Desa Sukaraja Ulu Krui. Badan Usaha Milik Desa disini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, yaitu:

1. Unit usaha sektor riil (Bidang jasa pelayanan)

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 Ayat (1).

2. Unit usaha bidang konstruksi (Penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung)
3. Unit usaha peminjaman modal¹⁴

BUMDes Kilu Angkon ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun belakangan tetapi keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi kemiskinan di Desa tersebut, masih adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkat kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui pada tahun 2016-2018:

Tabel 1.1
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui

No	Tingkat Kesejahteraan	2016	2017	2018
1	Jumlah keluarga pra sejahtera	104	96	86
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	94	102	114
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	55	63	70
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	16	26	34
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	4	5	7
	Jumlah Kepala Keluarga KK	273	292	311

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di desa sukaraja ulu krui masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Kilu Angkon) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mengentaskan kemiskinan masyarakat tetapi

¹⁴ Edi Furqon, Ketuan Bumdes Kilu Angkon, *Wawancara*, 04 Februari 2019.

hampir dua tahun berdirinya badan usaha tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di desa ini.

Padahal dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. dalam islam manusia juga dituntut untuk berusaha melakukan pembangunan agar terciptanya perubahan perekonomian yang lebih baik, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anfal (8) : 53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : “Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.¹⁵

¹⁵. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 185

Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan, penyuluhan pertanian seperti mengatasi hama untuk meningkatkan hasil panen, penyewaan (tenda tarup, kursi dan panggung), dan peminjaman modal tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Padahal, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Sukaraja Ulu Krui Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes tersebut dengan mengangkat judul penelitian: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengentaskan kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Sukaraja Ulu Krui Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat diketahuibahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat

keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk membuat penelitian lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada peran Badan Usaha Mili Desa (BUMDes Kilu Angkon) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat.?
2. Bagaimana pola pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.?
3. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat menurut perspektif ekonomi islam.?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa apakah dapat meningkatkan kesejahteraan dalam Badan Usaha Milik Desa yang diupayakan masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pola pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dalam pandangan Ekonomi Islam?

G. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

Dapat menjadi tambahan wawasan dalam hal keilmuan tentang bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Memberi manfaat untuk memperluas gambaran dalam penulisan skripsi. Bisa menjadi studi pembandingan maupun penunjang dalam penelitian mereka selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.13

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). *Field research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁸ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta,,: Ghalia Indonesia, 2002), h.38.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alpabeta, 2011), h.9

maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengentasan kemiskinan.

b. Sifat dan pendekatan penelitian

Dilihat dari sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁹ Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.²⁰ Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pegisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²¹

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh

¹⁹ Moh. Pabundo Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10

²⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.5

²¹ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

secara langsung dari lapangan, yaitu dari pihak pelaku usaha dalam Badan Usaha Milik Desa.

- b. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram,²² Al-Quran, Al-Hadist buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan profil desa (data sensus desa tahun 2018), maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari 4 dusun yakni berjumlah 311 KK.

b. Sampel

²² *Ibid*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), h.115

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.²⁴ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random sampling* atau juga yang biasa disebut sampel acak, atau dapat diartikan setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Menurut Arikunto dalam buku Sugiyono “penentuan pengambilan sampel kualitatif sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% saja dari jumlah keseluruhan populasi.²⁵ Penelitian ini menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi yaitu 311 KK di 4 dusun Desa Sukaraja Ulu Krui yang berarti sampelnya berjumlah 31 KK. Adapun cara penarikan individu sebagai sampel pada tiap-tiap dusun dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan *Purposive Random Sampling* yakni dari masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui masing-masing populasinya diambil 10%.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi

²⁴ Ibid, h.116

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h.62

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁶ Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis observasi dengan non partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terkait Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan diwawancarai adalah pelaku usaha pada Badan Usaha Milik Desa dan warga masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan dapat juga berbentuk file di serfer. Data ini bersifat

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Penada Media Grup, 2011), h. 203

tidak terbatas pada ruang dan waktu.²⁷ Data-data yang di peroleh dari objek penelitian.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.²⁸ Menimbang dan menyaring data adalah benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan Data (*coding*), yaitu Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

²⁷ Juliyansyah Noor, *metode penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 141.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 91.

- 3) Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah metode positivistik yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.²⁹ Untuk mengelolah data diperoleh agar penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penulis menggunakan metode induktif-generalisasi yaitu hipotesis yang disinggung di atas karena hasil pemikiran rasional, maka kebenarannya masih bersifat sementara. Oleh karena itu, harus didukung oleh kesesuaian data korespondensi. Sedangkan kesimpulan yang bersifat generalisasi dari data empiris disebut logika induktif yang peluang kebenarannya bersifat probobabilistik. Penelitian induktif ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat umum kepenelitian yang bersifat khusus, dimana kenyataan di lapangan di kaitan dengan teori yang ada.

²⁹ Ibid, h. 126

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal tersebut masuk kedalam cakupan pembangunan ekonomi daerah yaitu di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.³⁰

Akar dari seluruh proses pembangunan adalah Desa, sehingga Desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang

³⁰ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2015), h.374.

berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.³¹

Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa. Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*Empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan

³¹Sapari Imam Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004). h. 56.

kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.³² Sejalan dengan itu, segala potensi lokal walaupun Kecil tetap tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat. Pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Tujuan pembangunan yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat beberapa pendekatan dalam menggambarkan pembangunan Desa, yaitu tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat Desa.³³ Konsep pembangunan Desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan berjalan dengan baik. Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan Desa meliputi dua aspek utama yaitu :³⁴

³² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17.

³³ *Ibid.* h. 18

³⁴ Sapari Imam Asy'ari, *Ibid.* h. 57

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnyadisebut sebagai pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan Desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan Desa dari bawah keatas (*bottom up*) juga harus diwujudkan menjadi *village self planning*, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Desa.³⁵ Kemudian peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara

³⁵HAW Widjaja, *Otonomi Desa (Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 98.

pemerintahan Desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi Desa.³⁶

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni aset-aset kekayaan Desa (*property right*). Dengan demikian, sebenarnya otonomi Desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka Desa adat, bukan Desa administratif.³⁷

Tujuan dari otonomi desa salah satunya adalah memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan, menggerakkan ekonomi lokal dan merangsang partisipasi masyarakat. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa mendorong agar Desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumberdaya yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa.

³⁶Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

³⁷Naskah Akademik RUU Desa, *Ibid*.

Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”³⁸

3. Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.³² Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana *Uphoff* (dalam Cernea) menyatakan: Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai akibat, seperti :

³⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di tingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.
- b. Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh dari pada teknologi masyarakat itu sendiri.
- c. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan menghambat proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa.³⁹ Dalam perkembangannya model pemberdayaan telah menciptakan suatu metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program pembangunan. Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
- b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

³⁹HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.35.

Sementara itu kesamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pembangunan yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian. Terkait dengan dikeluarkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa diperkirakan akan mencapai 1 milyar lebih. Anggaran sebesar itu sebagian besar harus dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Pemberdayaan lebih fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan mereka dari jeratan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian kegiatan produktif untuk meningkatkan derajat pendapatan (*income generation*). Terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, ada 3 hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang oleh Sumadoyo disebut sebagai Tri Bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan, sementara itu Mardikanto menambahkan satu lagi yaitu bina kelembagaan.

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

⁴⁰*Ibid.* h.76.

2. Bina usaha

Bina usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang berkaitan tentang usaha.

3. Bina Lingkungan

Sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) masalah lingkungan masalah lingkungan dipandang sangat penting dalam pembangunan.

4. Bina Kelembagaan

Menurut Hayami dan Kikuchi mengatakan kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat).

Pemberdayaan ekonomi yang diajarkan dan dicontohkan oleh para pendakwah Islam adalah merupakan salah satu upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kemandirian ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi local dan pengembangan budaya bisnis syari'ah. Pada optimalisasi potensi local, yang menjadi parameternya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali, mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal.

Proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan yang bermanfaat untuk individu tersebut dengan berdasarkan kualitas dan skill yang dimiliki.⁴¹ Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan”bukan pada “penghapusan kemiskinan”semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴²

⁴¹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29.

⁴² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), h. 2

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.⁴³ Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)

⁴³Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)⁴⁴

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

⁴⁴ *Ibid*, h. 10

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁴⁵

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.⁴⁶

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling

⁴⁵ Kadek Sumiasih, *Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, h. 574

⁴⁶ Harry Kamaroesid, *Ibid*, h. 18-19

dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

3. Peranan BUMDes

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu;

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Seyadi, *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), h. 16

4. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴⁸

5. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

⁴⁸ Harry Kamaroesid, *Ibid*, h. 13-16

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁴⁹

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

6. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

⁴⁹ Departement Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, 2007, h. 13

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes⁵⁰

a. BUMDES *Banking*

BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

b. BUMDes *Serving*

⁵⁰ Harry Kamaroesid, *Ibid*, h. 3-5

BUMDes *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.

c. BUMDes *Brokering*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

d. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa yang ada di pulau jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekakas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin mollen.

e. BUMDes *Trading*

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

9. Pembagian keuntungan

Pembagian hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha, pembagian keuntungan yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Bagi hasil BUMDes dialokasikan untuk :⁵¹

- a. Pendapatan desa
- b. Pemupukan modal usaha
- c. Pendidikan dan pelatihan pengurus
- d. Penasehat
- e. Pengelola/direktur
- f. Kepala unit usaha dan karyawan
- g. Pengawas
- h. Dana cadangan

C. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Bank Dunia (2014) yang menjelaskan bahwa kemiskinan telah menunjukkan bahwa adanya tiga dimensi (aspek atau segi) yaitu: pertama, kemiskinan itu multi dimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak

⁵¹ Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h. 30

langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif. Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.⁵² Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman. Baik di tinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antaralain :

- a. Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- b. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan sistem yang berlaku.
- c. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total⁵³ Kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai, pertama, *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun temurun.

⁵²Hadi Payitno, Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 98

⁵³Cica Zartika, “*Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*” (Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), h. 7

Daerah seperti ini umumnya merupakan daerah-daerah yang krisis sumber daya alamnya, atau daerah yang terisolasi. Kedua adalah *cyclical proverty*, yaitu kemiskinan yang meliputi pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga, adalah *seasonal proverty*, yaitu kemiskinan musim seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan. Keempat adalah *eccidental proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak daerah suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁵⁴ Metode yang digunakan BPS 2014 adalah menghitung garis kemiskinan (KG) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Perhitungan Garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.⁵⁵ Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke-52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-

⁵⁴*Ibid*, h. 12

⁵⁵Badan Pusat Statistik. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran 2016/2017* .(Pesawaran: Badan Pusat Statistik, 2017) h. 20

komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.⁵⁶ Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selain itu, dimensi lain yang harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2. Indikator Kemiskinan

BAPPENAS memberikan rumusan yang konkrit sebagai indikator utama kemiskinan adalah:

- a. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
 - b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
 - c. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
 - d. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
 - e. lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;
 - f. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
 - g. terbatasnya akses terhadap air bersih;
 - h. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
 - i. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
 - j. lemahnya jaminan rasa aman;
-

- k. lemahnya partisipasi;
- l. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
- m. tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI (2005: 15-16), yaitu :.

- a. Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah propinsi dan kabupaten/kota.
- b. Ketergantngan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial).
- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).

- d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- f. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan.
- g. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
- h. Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.
- i. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Secara umum jika 3 (tiga) kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka sebuah keluarga sudah dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin yang layak untuk memperoleh pelayanan. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin fakir keluarga tersebut dan harus diprioritaskan penanganannya. Untuk indikator rumah yang tidak layak huni (sebagai indikator ke-9 di atas), dapat dilihat dari kriteria berikut :

- 1) Luas bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruangan yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur) atau luas lantai per orang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m².
- 2) Lantai masih dari tanah/bambu/diplester secara sederhana.
- 3) Kesulitan memperoleh air bersih.
- 4) Tidak memiliki tempat mandi, cuci pakaian dan membuang air besar (MCK) di rumah sendiri yang memenuhi syarat kesehatan.

- 5) Tidak mempunyai sirkulasi udara yang dapat memungkinkan sinar matahari dan udara masuk rumah dengan baik.
- 6) Dinding umumnya terbuat dari bambu/papan/bahan mudah rusak.
- 7) Sanitasi lingkungan di sekitar rumah tidak sehat.

Secara umum jika 2 (dua) kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka sebuah rumah sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi semakin tidak layak huni rumah tersebut, dan harus diprioritaskan penanganannya.

3. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Definisi Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ajaran agama islam tidak adanya pemisahan antara aspek moral dan materi, spiritual dan fisikal dan aspek dunia dan akhirat dalam kehidupan seorang Muslim, tidak seperti faham sekularisme yang memisahkan antara keduanya. Begitu juga dalam mendefinisikan kemiskinan, kita harus mempertimbangkan ke-dua aspek ini secara berimbang. Dengan kata lain, seseorang yang mungkin dikategorikan "miskin secara materi" yang biasanya diukur dengan unit moneter (uang), belum tentu tergolong ke dalam kategori orang-orang "miskin secara spiritual", yang biasanya diukur dengan kadar kedekatan kepada Allah SWT (ketakwaan). Dalam bukunya *"Economic Development and Social Peace in Islam"*, Mannan (1989) menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek

material. Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Sedangkan, orang miskin secara spiritual adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, seperti pengetahuan agama (ukhrawi) dan umum (duniawi) yang diperlukan dalam "berubudiyah" dan "bertaqarrub" kepada Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai "*akhlaqul karimah*". Jadi, kombinasi ke dua definisi kemiskinan ini adalah definisi ideal kemiskinan menurut Islam. Kemiskinan itu tidaklah terletak pada sedikitnya harta, tetapi terletak pada kering kerontangnya hati. Islam melarang umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS, An-nisa sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (QS. An Nisa : 9)*

Secara etimologis, lafadz *miskîn* merupakan isim masdar yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakanasukûn*, kata ini memiliki makna „diam“, „tetap“ atau *reda*. Al-

Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai, tetapnya sesuatu setelah ia bergerak". Selain arti tersebut, kata *sakana-sukûn* juga bisa diartikan sebagai „tempat tinggal". Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti „diam", maka kata Miskîn dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak.⁵⁷ Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, katamiskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.⁵⁸ Kesejahteraan dapat

⁵⁷ Ibn Mansûr, *Lisân al-Arab*, Juz III (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), h. 260

⁵⁸ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.146

diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.⁵⁹ Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”⁶⁰ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam.

Untuk mengentaskan kemiskinan maka perlu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya.

⁵⁹ Anwar Abbas, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), h.126

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.⁶¹

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya.⁶²

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal (*aql*).

Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini

⁶¹ Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17.

⁶² Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401.

dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.”⁶³ Sedangkan menurut P3EI yang mengemukakan teori Umar Chapra kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:⁶⁴

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur

⁶³Adiwarman.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 62.

⁶⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2.

berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu Ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan, dan petengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi islam. Nilai-nilai ekonomi islam itu adalah:⁶⁵

1) Ekonomi Ilahiyyah

Karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip Ilahiyyah dan tujuan Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

2) Ekonomi Akhlak

Yaitu ekonomi islam yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami.

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 91.

Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengonsumsinya tetapi terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek Kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi.

4) Ekonomi Pertengahan

Merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, anatara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

3. Indikator Kesejahteraan

a. Indikator Kesejahteraan Secara Umum

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang

dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.⁶⁶ Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:⁶⁷

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- (a) Tinggi (Rp.>5.000.000)
- (b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- (c) Rendah (< Rp.1.000.000)

2) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk

⁶⁶ Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2008, h.4.

⁶⁷ *Ibid*, h. 17-18.

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi

hukumhukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Develoepment Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).⁶⁸ Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

5) Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m dan bagian

⁶⁸ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia*, h.13.

terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:⁶⁹

- (a) Keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- (b) Keluarga sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- (c) Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung.
- (d) Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun

⁶⁹ Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, *“Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund”*, Journal Acta Diurnal Edisi (april 213), h.8.

belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan maupun ikut secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

- (e) Keluarga sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan.

b. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, indikator kesejahteraan Islami adalah:⁷⁰

“Terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”.

Dengan demikian, Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan,

⁷⁰ *Ibid*

harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

1) Kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*)

Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.

(a) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang penting untuk terpenuhi karena dalam beraktifitas manusia membutuhkan sandang atau pakaian untuk berpergian.

(b) Kebutuhan Pangan/ Makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan harus terpenuhi, karena manusia untuk bertahan hidup dan menjalani semua aktifitas kesehariannya harus memenuhi kebutuhan akan makan setiap harinya.

(c) Tempat Tinggal

Rumah merupakan hal yang penting dalam sebuah keluarga sebagai tempat berlindung setiap harinya. Dikatakan sejahtera dalam hal ini apabila sudah menempati rumah sendiri, selain

itu kondisi rumah yang sudah ditembok plester dan luas yang sudah memenuhi kategori layak huni yaitu $8m^2$ untuk setiap satu anggota keluarga dan jenis lantai yang sudah disemen/dikeramik.

(d) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan dimana jiwa dan raga seseorang dalam keadaan yang baik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari .

(e) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan serta pengetahuan seseorang yang akan berdampak terhadap perbaikan taraf hidup seseorang.

2) Kebutuhan sekunder (*Al-hajiyat*)

Kebutuhan sekunder juga penting dalam menunjang pemeliharaan 5 tujuan syariat, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kesempurnaan (*Tahsinīyat*)

Kesempurnaan atau kebutuhan tersier berguna sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan sekunder.

E. Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

1. Kewajiban Bekerja dalam Islam

Bekerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seseorang muslim tetapi sekaligus meningkatkan martabat dirinya mensyukuri nikmat Allah SWT. Apabila bekerja itu merupakan fitrah manusia, maka jelaslah manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk umat kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, untuk kemudian runtuh dalam kedudukan yang lebih hina dari pada binatang.⁷¹

Berikut ini merupakan landasan dasar seseorang berusaha untuk mengikuti jejak Rasul dalam kegiatan bisnis terdapat dalam Qu'ran Surat At- Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS.At-Taubah:105)

⁷¹ Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta:PT.Reka Cipta,1995), h.1-2

Dalil tersebut menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bekerja, dan Allah pasti akan membalas apa yang telah dikerjakan. Allah akan menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Bekerjalah karena Allah semata dengan amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk individu atau untuk masyarakat umum, maka Allah akan memberi ganjaran untuk amalan yang dikerjakan.⁷²

Allah menyebut kalimat kerja dengan frekuensi yang sangat banyak. Bahkan hampir setiap halaman Al-Quran ada yang mereferensikan kepada kerja itu. Sebanyak 360 ayat yang membicarakan tentang ‘amal’ dan 109 yang membicarakan tentang ‘fill’ (dua kata itu sama-sama bermakna kerja dan beraksi). Frekuensi penyebutan tentang kerja produktif dan aktivitas yang menghasilkan di dalam Al-Quran.

Kewajiban berusaha dan bekerja bagi umat Islam juga tercantum dengan jelas dalam firman Allah dalam Surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

⁷² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah Dan Tafsir)*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), h. 60-61

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS.Al-Qashash:77)*

Dalam AL-Quran ditentang tindakan malas dan menyia-nyiakan waktu, baik dengan cara berpangku tangan dan tinggal diam maupun melakukan hal-hal yang tidak produktif. Allah selalu menyeru manusia untuk menggunakan waktu dengan cara menginvestasikannya dalam berbagai tindakan dan kerja yang baik.⁷³ Dan pada dasarnya dalam agama islam-pun mengatur umat dalam hal bekerja, dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar etika islam dan prakteknya dalam bisnis ataupun bekerja yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam prekonomian islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan masyarakat banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis:

- a. Terdapat kesamaan perlakuan
- b. Kesamaan hak kompensasi

⁷³ Mulyitama, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha yang Islami*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), h.125-126

- c. Tidak adanya pihak yang dirugikan

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis:

- a. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah.
- b. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya.

3. *Responsibility* (tanggung jawab)

Merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya adalah:

- a. Upah harus sesuai
- b. Pemberian upah harus tepat waktu

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam tugas akhir ini dan berapa banyak orang yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tugas akhir ini, untuk itu penulis telah menemukan beberapa pustaka, beberapa buku hasil terbitan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lainnya yang sejenis dengan tugas akhir ini.

Ratna Aziz Prasetyo, (Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) menemukan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih rendah, hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang program BUMDes. Program kegiatan BUMDes di Desa Pejambon belum banyak diketahui oleh masyarakat.⁷⁴

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Menemukan bahwa, Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.⁷⁵

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, (Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta). Menemukan bahwa, Keberadaan BUMDES

⁷⁴Ratna Aziz Prasetyo, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Dialektika*, Vol.XI No.1 (Maret 2016), h. 98

⁷⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa". *Journal of Rural and Development*, Vol.V No.1 (Februari 2014), h. 13

membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDES memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga. Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.⁷⁶

Bambang, (Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer). Menemukan bahwa, akad-akad dalam ekonomi islam dapat di terapkan pada kegiatan usaha BUMDES yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Penerapan ekonomi syariah dalam bisnis BUMDES ini diharapkan mampu membuat pengelolaan sumber daya desa dan pelayanan masyarakat menjadi lebih adil dan bijaksana. Meskipun, terdapat kelemahan dan ancaman yang mungkin datang dalam penerapan konsep bisnis baru BUMDes ini.

Anwar Basri, (Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Desa). Menemukan bahwa, Kehadiran negara dalam pemberdayaan

⁷⁶ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta", *Jurnal Modus*, Vol. 28 No.2, (2016), h. 155-167

masyarakat di Desa Banglas melalui pembentukan BUMDes Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni Penambahan PADes, Mengurangi Monopoli Usaha oleh Kelompok Tertentu, dan adanya Upaya Pembangunan Desa Secara Mandiri. Dengan demikian, peran negara (pemerintah) dalam membangun ekonomi di Desa Banglas sudah dimulai dari pelaku ekonomi terkecil. Terdapat beberapa masalah peranan negara dalam membangun ekonomi di Desa Banglas, yaitu Sejak menjadi BUMDes SHU selalu mengalami penurunan, berkurangnya alokasi SHU untuk dana sosial, berkurangnya dana alokasi SHU untuk pembangunan desa, dan adanya stagnasi jumlah tunggakan antara tahun 2013 dan tahun 2014. Dengan demikian, BUMDes Banglas Bestari disimpulkan mengalami masalah yang cukup serius, terutama soal tunggakan dan manajemen. Meskipun demikian, usaha BUMDes terutama di bidang transportasi patut diapresiasi. Adanya sarana penyeberangan yang disebut masyarakat setempat sebagai “*kempang*”. Kempangini sangat vital bagi warga desa Banglas ketika ingin melintasi sungai yang ada di Desa Banglas. Biaya penyeberangan itulah yang nantinya akan menjadi PADes Desa Banglas disamping usaha-usaha lainnya yang dikelola BUMDes.⁷⁷

Kadek Sumiasih, (Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata ,Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Menemukan bahwa, Eksistensi BUMDes di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa yang membentuk

⁷⁷ Anwar Basri, “Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Desa”. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14 No. 3 (September 2016), h. 157-236

BUMDes. Keberadaan BUMDes di Bali dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun masih terdapat desa di Bali termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hal tersebut disebabkan oleh kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, keterbatasan SDM pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha, belum maksimalnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah, belum maksimalnya pengalokasian modal dan kurang digalinya potensi desa. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan unsur pengelolaan seperti jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban, dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat dijadikan contoh oleh desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.⁷⁸

Jonnius, (Analisis Kinerja Karyawan BUMDes Di Kabupaten Kampar). Menemukan bahwa, Secara umum tingkat kinerja, kompetensi potensi, kompetensi reality dan motivasi karyawan BUMDes di Kabupaten Kampar kategori tinggi. Dari ketiga variabel independen, ternyata kompetensi *reality* dan motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, sedangkan kompetensi potensi tidak. Secara keseluruhan ketiga variabel independen

⁷⁸ Kadek Sumiasih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi Di Desa Pakse Bali Kabupaten Klungkung". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4 (Desember 2018), h. 565-585

dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 44,4%, sedangkan sisanya 55,6% akan dijelaskan oleh variabel lain selain ketiga variabel tersebut.⁷⁹

Niswatun hasanah, (Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Menemukan bahwa, Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Pada level ini, BUMDes belum menemukan strategi yang terkonsep dalam implementasi strategi yang digunakan. Bahkan dalam kaitannya dengan strategi yang harus dilakukan oleh BUMDes, peneliti belum menemukan adanya strategi yang jelas baik dalam pengembangan usaha (bisnis) atau korporate (lembaga) nya. Karena dalam menentukan strategi diperlukan tahapan analisis, pilihan dan implementasi strategi. Dimana analisis strategi itu didapatkan melalui turunan visi dan misi yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Meskipun secara pengembangan bisnis, BUMDes telah menghasilkan omzet yang meningkat setiap tahunnya.⁸⁰

⁷⁹ Jonnius, “Analisis Kinerja Karyawan BUMDes Di Kabupaten Kampar”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.17, No.1 (Januari-Juni 2014), h. 101

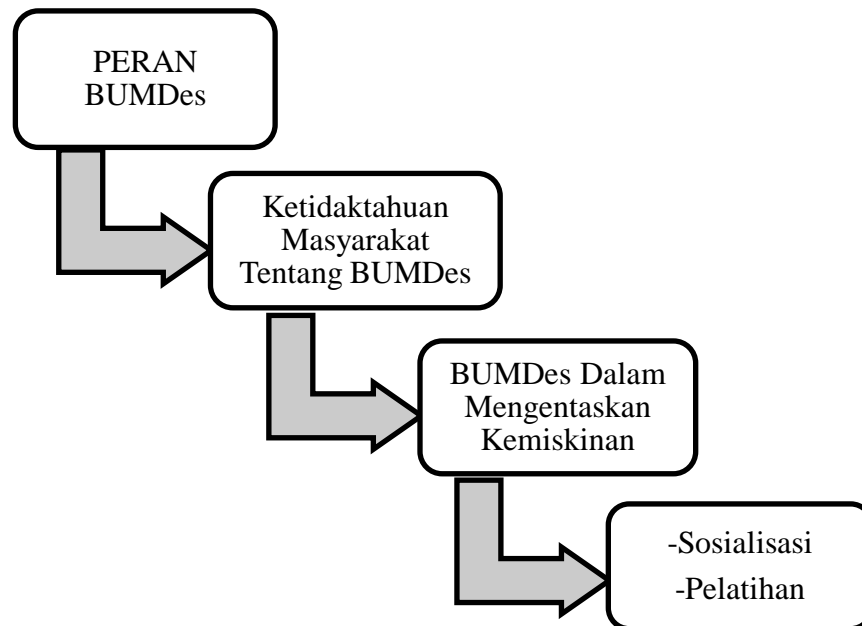
⁸⁰ Niswatun Hasanah, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Melirang Kecamatan Bungah

Penelitian ini meneliti tentang peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mengentaskan kemiskinan perspektif ekonomi islam di Desa Sukaraja Ulu Krui Way Krui Kab.Pesisir Barat, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang di Desa Sukaraja Ulu Krui, metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Kerangka Berfikir

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa. Dana BUMDES berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten serta Pemerintah Desa. BUMDes berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukaraja Ulu Krui. Namun, tidak sedikit masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui ini yang tidak tahu akan keberadaan unit-unit usaha BUMDes maupun BUMDes itu sendiri, sehingga masih perlu adanya sosialisasi maupun pelatihan tujuannya agar masyarakat desa mengetahui adanya BUMDes maupun unit-unit usaha BUMDes tersebut serta agar mereka tergugah untuk bergabung dalam memanfaatkan usaha BUMDes tersebut.

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat desa Sukaraja Ulu Krui

Sukaraja Ulu Krui adalah sebuah Desa atau Kelurahan di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Desa Sukaraja Ulu Krui yang sebelumnya bernama Desa Ulu Krui merupakan salah satu desa tertua yang berada di Kecamatan Way Krui, seiring tahun berlalu terjadi pemekaran yang mengakibatkan Desa Ulu Krui dipecah menjadi 4 desa yakni Desa Labuhan Mandi, Desa Gunung Kemala, Desa Gunung Kemala Timur, dan Desa Sukaraja Ulu Krui.

Sukaraja Ulu Krui dihuni oleh 311 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.968 jiwa, Penduduk di Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri atas laki-laki sebanyak 932 jiwa dan perempuan sebanyak 1.036 jiwa. Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri dari 4 (empat) dusun yang terbagi menjadi Dusun 1 (Suka Jaya), Dusun 2 (Tengah/Babat), Dusun 3 (Lembah Subur), dan Dusun 4 (Bimbin Jaya). Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui terdiri dari bermacam-macam suku mulai dari Lampung, Jawa, Sunda dan masih banyak yang lainnya. Sebagian besar masyarakat berprofesi petani dan buruh. Adapun pejabat Desa yang menjabat di Desa Sukaraja Ulu Krui ialah sebagai berikut:

TABEL 3.1
Pejabat Desa Sukaraja Ulu Krui

NO	NAMA	JABATAN
1	Akhyaruddin	Kepala Desa
2	Andi Bangsawan	LHP
3	Beni Setiawan	Sekretaris
4	Khairul Anwar	Bendahara
5	Nurhasan	Kaur Umum
6	M. Rozi	Kaur Perencanaan
7	Nizom Ansori	Kaur Pembangunan
8	Media Audina	Kasi Tehnik Bidang Pemerintahan
9	Melda Sopana	Kasi Tehnik Bidang Pemberdayaan Dan Kemasyarakatan
10	Zikwan B	Kadus 01
11	Amri Rahman	Kadus 02
12	Habiburrohman	Kadus 03
13	Mustika	Kadus 04

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

2. Keadaan Wilayah

Secara geografis Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Luas wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui adalah 750 Ha, yang terbagi menjadi tanah perkebunan/perkebunan 416 Ha, tanah permukiman penduduk 307 Ha, dan untuk fasilitas umum 32 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui adalah sebagai berikut:⁸¹

- Sebelah utara : Desa Gunung Kemala
- Sebelah selatan : Desa Suka Baru
- Sebelah timur : Hutan HTR

⁸¹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, *Profil Desa dan Kelurahan Sukaraja Ulu Krui*, 2018, h. 3

- Sebelah barat : Desa Menyancang

Obitrase atau jarak tempuh di Desa Sukaraja Ulu Krui cukup strategis yaitu sebagai berikut:

- Berjarak 1 km dari desa atau kelurahan terjauh.
- Lama jarak tempuh ke desa atau kelurahan terjauh dengan motor yaitu 2 menit.
- Berjarak 2 km dari ibukota kecamatan.
- Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 4 menit.
- Berjarak 4 km dari pusat kedudukan wilayah kerja pembantu bupati.
- Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 8 menit.
- Berjarak 4 km dari ibukota Kabupaten.
- Lama jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor selama 8 menit.

3. Keadaan Demografis Desa Sukaraja Ulu Krui

a. Jumlah penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui menurut umur

Berikut diperoleh data mengenai jumlah penduduk menurut umur di Desa Sukaraja Ulu Krui. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

Tabel.3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa
Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir
Barat

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	0-4	97
2	5-6	84
3	7-14	291
4	15-17	134
5	18-24	389
6	25-54	881
7	55 keatas	92
Jumlah		1.968

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

Tabel.3.2 menunjukkan bahwa sebanyak 881 jiwa penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui berada pada usia antara 25-54 tahun atau dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui didominasi oleh penduduk berusia produktif sehingga mampu menjalankan usaha secara optimal.⁸²

b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Penduduk yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui merupakan penduduk yang memiliki pendidikan yang terbilang rendah, dari data monografi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel.3.3

⁸² *Ibid*, h. 4

Tabel.3.3
Tingkat pendidikan penduduk Desa Sukaraja Ulu Krui
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	20 orang	22 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	19 orang	23 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	198 orang	224 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	1 orang	-
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	3 orang	2 orang
7	Tamat SD/ sederajat	39 orang	48 orang
8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	5 orang	9 orang
9	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	16 orang	12 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	241 orang	250 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	371 orang	420 orang
12	Tamat D1/ sederajat	5 orang	4 orang
13	Tamat D2/ sederajat	3 orang	6 orang
14	Tamat D3/ sederajat	4 orang	7 orang
15	Tamat S1/ sederajat	6 orang	9 orang
Jumlah		932 orang	1036 orang
Jumlah Total		1968 orang	

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

Tabel.3.3 menunjukkan bahwa pendidikan formal yang pernah diikuti sebagian penduduk di Desa Sukaraja Ulu Krui yaitu sekolah menengah ke atas (SMA) berjumlah 791 orang. Hal ini sesuai berdasarkan data primer yang diperoleh saat melakukan wawancara di Desa Sukaraja Ulu Krui.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan gambaran umum keadaan yang dimiliki orang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat yang dilihat dan diukur dari tingkat ekonominya dan erat kaitannya dengan

sumber mata pencaharian penduduk yang merupakan jantung kehidupan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum penduduk desa Sukaraja Ulu Krui bermata pencaharian sebagai petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh, pengrajin, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya.

Tabel 3.4

**Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	145
2	Buruh tani/perkebunan	88
3	Buruh Swasta	3
4	Pegawai Negeri	7
5	Pengrajin	6
6	Pedagang	49
7	Peternak	13
	Jumlah	311

Sumber : Dokumentasi Data Desa Sukaraja Ulu Krui (2018).

Berdasarkan Tabel.3.4 tentang mata pencaharian pokok masyarakat desa Suka Raja Ulu Krui, menunjukkan bahwa mata pencarian pokok yang digeluti oleh masyarakat desa sukaraja ulu krui rata-rata adalah petani dengan jumlah 145 orang.

Dari tabel mata pencarian masyarakat desa sukaraja ulu krui mencerminkan bahwa besaran pendapatan paling banyak

<Rp.1.000.000 sesuai dengan profesinya sebagai petani seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 3.5

Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui

No	Besar Pendapatan Perbulan	Persentase
1	<Rp.1.000.000	58%
2	Rp.1.000.000-5.000.000	38%
3	>Rp.5.000.000	4%
	Jumlah	100%

Sumber: dokumentasi data desa sukaraja ulu krui 2018

d. Kondisi Perumahan Desa Sukaraja Ulu Krui

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan suatu keluarga disamping kebutuhan akan pangan dan sandang. Kondisi rumah yang ada di desa sukaraja ulu krui secara keseluruhan merupakan rumah yang layak huni, untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6

Kondisi Perumahan Desa Sukaraja Ulu Krui

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

No	Kondisi Jenis Rumah	Keadaan	Jumlah
1	Rumah Menurut Dinding	Tembok Kayu	162 rumah 125 rumah
2	Rumah Menurut Lantai	Keramik Semen	112 rumah 175 rumah
3	Rumah Menurut Atap	Genteng Seng Asbes Beton	70 rumah 168 rumah 45 rumah 4 rumah

Sumber: Dokumentasi data desa sukaraja ulu krui (2018)

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon

1. Organisasi BUMDes Kilu Angkon

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui telah membuat peraturan Desa No.4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tugas dan tanggungjawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan dan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui.

Pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Sukaraja Ulu Krui. BUMDes ini berdiri pada 04 April 2016, dengan SK Kepala Kampung No:001/SK/VII.12.14/VII/2016 tentang BUMDes Kilu Angkon, serta dilengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih BUMDes Kilu Angkon ini telah berjalan selama 2 tahun. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki BUMDes juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

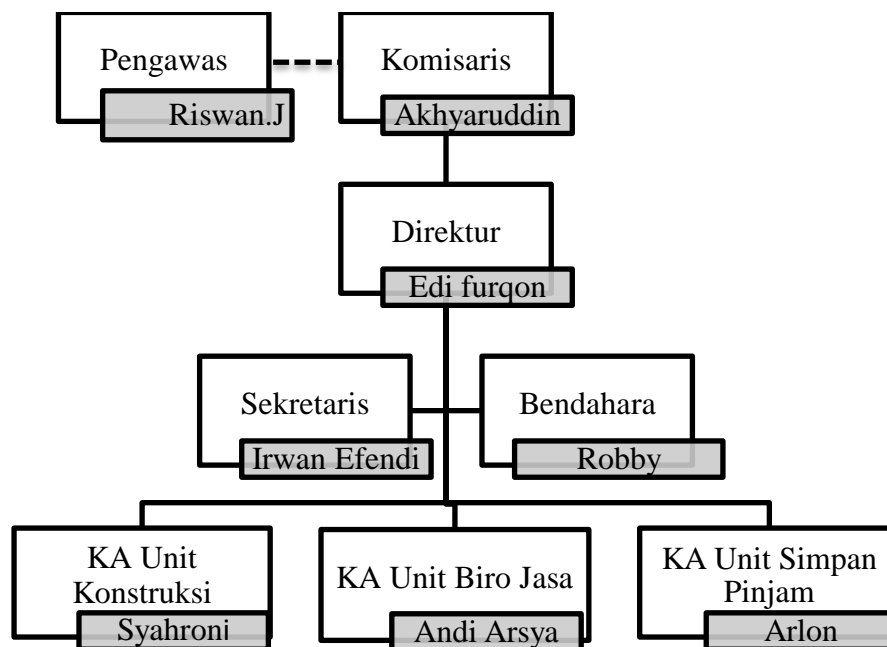
2. Tujuan Pembentukan BUMDes Kilu Angkon yaitu:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sukaraja Ulu Krui dalam rangka meningkatkan kemajuan Pemerintah Desa dan Pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Sukaraja Ulu Krui untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes.
- d. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.⁸³

⁸³ Dokumen BUMDes Kilu Angkon

3. Struktur Kepengurusan BUMDes Kilu Angkon

BAGAN 1
Struktur Organisasi Pengelola BUMDes “KILU ANGKON”
Desa Sukaraja Ulu Krui⁸⁴



Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes Kilu Angkon terdiri dari:

a. Pengawas

Adapun tugas Bapak Riswan Japinus untuk mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa

⁸⁴ Dokumentasi, Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Kilu Angkon Desa Sukaraja Ulu Krui, 2018.

b. Komisaris

Bapak Akhyarudin mempunyai tugas untuk membina dalam pelaksanaan operasional BUMDes

c. Direktur

Bapak Edi Furqon Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, Tugas Direktur adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin organisasi BUMDes
- 2) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- 3) Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
- 4) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa
- 5) Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar
- 6) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
- 7) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musyawarah Desa
- 8) Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

d. Sekretaris

Bapak Irwan Efendi Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes. Diantarnya :

- 1) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- 3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- 4) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- 5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- 6) Mengelola surat menyurat secara umum
- 7) Melaksanakan kearsipan
- 8) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

e. Bendahara

Bapak Robi Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya ;

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaanam fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- 2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
- 3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- 4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha

- 5) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
- 6) Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- 7) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- 8) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- 9) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 10) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- 11) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

f. Ketua unit usaha

Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- 4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- 5) Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan

- 6) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
 - 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
4. Visi misi BUMDes Kilu Angkon
- a. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa.
 - b. Menciptakan kesempatan berusaha.
 - c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan.
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa.
 - e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.
 - f. Memberikan kesempatan usaha, dan
 - g. Membuka lapangan pekerjaan.⁸⁵

5. Unit Kegiatan Usaha dan Pengelolaan BUMDes Kilu Angkon

Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Kilu Angkon.

a. Unit Usaha Bidang Konstruksi

Bentuk usaha bidang konstruksi berupa penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung. Tenda tarup, kursi, dan panggung yang terdapat pada BUMDes ini berjumlah 5 unit tenda tarup, satu set kursi (500 unit) dan satu set panggung. Penyewaan tenda tarup, kursi dan

⁸⁵ *Ibid.*

panggung ini masing-masing terhitung per hari dengan biaya sewa yakni Rp.250.000/unit untuk tenda tarup, sedangkan kursi Rp.1.250.000/set, dan panggung Rp.750.000/set. Keseluruhan dari pendapatan ini merupakan pendapatan kotor karna masih harus dibagi untuk pekerja, setelah dibagi untuk pekerja kemudian pendapatan ini disetor ke BUMDes sudah termasuk pendapatan bersih. Dengan adanya unit usaha ini dirasa sangat membantu baik untuk pemasukkan BUMDes serta untuk menambah penghasilan keluarga masyarakat desa itu sendiri, banyak masyarakat desa yang menyewa tenda tarup, kursi dan panggung ini untuk acara pernikahan, aqiqahan, sunatatan, syukuran dan lain sebagainya. Dengan banyaknya fungsi ataupun manfaat dari penyewaan tersebut sangat membantu untuk pemasukan BUMDes serta penambahan penghasilan masyarakat sekitar.⁸⁶

Tidak hanya itu, tenda tarup, kursi dan panggung ini tidak hanya digunakan ataupun disewakan di desa sukaraja ulu krui tetapi juga disewakan untuk desa-desa lain yang tidak memiliki tenda tarup, kursi dan panggung di desanya kemudian menyewa di BUMDes Kilu Angkon. Tentu berpengaruh besar bagi pemasukkan BUMDes dan masyarakat yang mengambil peran di BUMDes ini. Jenis usaha ini termasuk kedalam jenis usaha *Renting*.

⁸⁶ Akhyaruddin, Kepala Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 02 Februari 2019.

b. Unit Usaha Dibidang Jasa Pelayanan (Sektor Riil)

1) Pelatihan pembuatan kerajinan tangan

Pelatihan ini sangat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wanita khususnya ibu rumah tangga. Di Desa Sukaraja Ulu Krui para wanita sebagian besar ikut bekerja sebagai petani. Maka hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui. Masih terbatasnya peran perempuan mengakibatkan keluarga miskin karena dalam memenuhi kebutuhan keluarga hanya mengandalkan penghasilan suami. Hal ini karena kurangnya keterampilan atau tidak berdayanya seorang perempuan.

Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui yang bekerjasama dengan BUMDes Kilu Angkon mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan berbahan dasar bekas minuman berkemasan gelas yang kemudian dapat dikreasikan menjadi berbagai jenis kerajinan seperti wadah tisu, pass bunga, wadah minuman dan lain sebagainya. Pelatihan ini diberikan agar para perempuan bisa mengikuti pelatihan tersebut kemudian mereka mempunyai keahlian sehingga bisa dikembangkan. Dengan adanya program ini harapannya kaum wanita Desa Sukaraja Ulu Krui dapat menambah pendapatan disamping bekerja sebagai petani, Para kaum wanita perlu diberdayakan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pelatihan ini bukan ditujukan

hanya untuk ibu-ibu rumah tangga tetapi untuk para remaja. hingga saat ini masyarakat yang mengikuti pelatihan ini selalu bertambah banyak. Pembuatan kerajinan ini cukup sulit dan memerlukan ketelatenan sehingga diharapkan masyarakat agar dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena dengan mempunyai keterampilan maka kualitas sebagai perempuan akan lebih baik dan bisa membantu perekonomian keluarga.⁸⁷ Pelatihan kerajinan tangan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Kegiatan ini diadakan oleh Perangkat Desa Sukaraja Ulu Krui dan pengurus BUMDes Kilu Angkon.

2) Penyuluhan pertanian

Penyuluhan yang diadakan oleh BUMDes Kilu Angkon meliputi penyuluhan pemberantasan hama padi, jagung, pemupukan, pemanenan dan lain-lain. Penyuluhan pertanian dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun dan pementeri nya dari dinas pertanian. Kegiatan ditujukan untuk semua masyarakat khususnya petani. Program ini sangat didukung oleh pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui. Harapannya petani di Desa Sukaraja Ulu Krui mampu mengetahui solusi untuk membasmi hama sehingga hasil panen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.⁸⁸

⁸⁷ Beni Setiawan, Sekretaris Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 03 februari 2019.

⁸⁸ Edi Furqon, Ketua BUMDes Kilu Angkon , *wawancara* , 04 Februari 2019.

Program ini bekerjasama dengan anggota kelompok tani yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungan. Selanjutnya mereka didorong untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan.

Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan yang akan menghasilkan masyarakat yang dinamis, dan progresif. Penyuluhan juga akan membawa perubahan yang positif dalam aspek pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui yang mempunyai keluhan ataupun permasalahan persoalan pertanian dapat mengajukan pertanyaan ataupun konsultasi. Kemudian dari BUMDes Kilu Angkon akan mengadakan terkait konsultasi tersebut untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.⁸⁹

c. Unit Usaha Peminjaman Modal BUMDes Kilu Angkon

Pada unit usaha ini BUMDes memberikan peminjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah dana dari Desa yang merupakan hasil dana yang terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDes. Masyarakat diberi pinjaman

⁸⁹*Ibid*

sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya. Setiap pinjaman yang dilakukan dikenakan bunga 6% untuk BUMDes dengan waktu maksimal tempo selama 4 bulan, pengenaan bunga 6% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan pinjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh.⁹⁰ Namun unit usaha peminjaman modal ini belum berjalan baik, karena disamping keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

C. Peran BUMDes terhadap masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui

Keberadaan BUMDes di Desa Sukaraja Ulu Krui diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya sehingga dapat mengatasi kemiskinan di desa tersebut, meskipun BUMDes Kilu Angkon ini baru beroperasi selama 2 tahun dan baru memiliki beberapa unit usaha saja namun peranan BUMDes yang dijelaskan oleh Bapak Zubaidi, BUMDes Kilu Angkon ini telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa untuk memperoleh modal usaha maupun jasa pelayanan lainnya, seperti yang diterangkan beliau:

“Perannya BUMDes sangat baik terbukti BUMDes Kilu Angkon ini mampu terus berkembang meskipun belum terlalu signifikan, Peranan yang lain dengan adanya BUMDes yakni memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan prosedur yang sangat mudah serta diringankan pula karna sistem pembayaran yang berangsur-angsur, jasa pelayanan dan juga penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung.”⁹¹

⁹⁰ Arlon, Kepala Bidang Simpan Pinjam BUMDes Kilu Angkon, Wawancara, 04 Februari 2019.

⁹¹ Zubaidi, Warga Desa Sukaraja Ulu Krui, Wawancara, 04 Februari 2019.

Peran BUMDes dapat dirasakan oleh masyarakat, kehadiran BUMDes Kilu Angkon di Desa ini, sangat membantu sekali bagi masyarakat Desa. Seperti keterangan salah satu masyarakat Desa sebagai berikut:

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes kilu angkon ini, karena setiap tahunnya mereka melakukan penyuluhan tentang pertanian seperti pembrantasan hama padi, jagung, pemupukan dan pemanenan untuk meningkatkan hasil panen, kami khususnya petani sangat terbantu karna ada solusi dari mereka cara mengatasi masalah pertanian.”⁹²

Seperti yang telah dijelaskan kehadiran BUMDes telah memberikan kemudahan bagi masyarakat desa sukaraja ulu krui khususnya para petani di desa tersebut yang tadinya mereka panen kadang sering gagal dikarenakan tidak adanya pengetahuan untuk mengatasi hama sekarang sudah bisa panen lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. tidak hanya itu, wanita-wanita di Desa Sukaraja Ulu Krui khususnya ibu-ibu ataupun gadis-gadis yang sedang menganggur diberdayakan oleh BUMDes untuk bisa punya keahlian seperti adanya pelatihan kerajinan tangan sehingga mereka bisa punya potensi diri untuk dapat berpenghasilan, seperti keterangan salah satu gadis, warga desa sukaraja ulu krui sebagai berikut:

“Saya akui adanya BUMDes Kilu Angkon ini sangat membantu bagi saya terlebih saya salah satu yang kurang berpendidikan, saya hanya lulusan SMP dan tidak ingin keluar dari desa ini seperti orang-orang kebanyakan merantau keluar kota keluar negeri mengadu nasib bukan tidak ingin tapi saya ingin langsung merawat kedua orangtua saya yang sudah tua disini, jadi dengan adanya BUMDes ini saya bisa bekerja dan berpenghasilan serta tetap bisa merawat langsung kedua orang orangtua saya.”⁹³

⁹² Yasir Rahman, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 04 Februari 2019.

⁹³ Desi Liana, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 04 Februari 2019

Sementara itu, Bapak purwanto selaku masyarakat desa yang pernah melakukan penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung menuturkan bahwa:

“Saya menyewa perkakas pesta untuk acara pernikahan anak saya selama 1 hari dan biayanya lebih murah jika menyewa di BUMDes Kilu Angkon ini, dengan adanya penyewaan ini tidak perlu jauh-jauh lagi menyewa diluar desa sehingga akan lebih efisiensi waktu.”⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan informan-informan diatas dapat kita ketahui bahwa berdirinya BUMDes “Kilu Angkon” di Desa Sukaraja Ulu Krui ini memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat desa terutama terhadap akses pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan adanya BUMDes Kilu Angkon ini memberikan kemudahan kepada masyarakat masyarakat sehingga mereka tidak harus keluar desa ataupun kekecamatan yang berjarak tempuh sekitar 2 KM dari Desa Sukaraja Ulu Krui. Tidak hanya itu, unit usaha BUMDes yang lain berupa penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan acara-acara keluarga maupun desa. Namun meskipun BUMDes Kilu Angkon ini sudah cukup berperan terlebih dalam unit usaha sektor riil, namun peran BUMDes ini dirasa masih belum merata bagi masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, terbukti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BUMDes maupun unit-unit usaha yang ada pada BUMDes Kilu Angkon. Seperti penjelasan salah satu masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui menyatakan bahwa:

“Kalo ada BUMDes di desa ini saya sudah tau, tapi kalo ada apa aja unit usahanya saya tidak tau, Cuma taunya di BUMDes bisa sewa tenda tarup saja”.⁹⁵

⁹⁴ Hasan Urat, Penyewa Tenda Tarup, *wawancara*, 04 Februari 2019.

⁹⁵ Nursiwan, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 05 Februari 2019.

Tidak hanya itu, salah satu pemuda desa sukaraja ulu krui juga menjelaskan sebagai berikut:

“Saya kurang tau kalau ada BUMDes di desa ini apalagi kegiatannya, jadi saya kurang paham.”⁹⁶

Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes maupun tentang adanya unit-unit usaha BUMDes ini cukup memberikan bukti bahwa peran BUMDes Kilu Angkon ini belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui terlebih bagi masyarakat yang tinggal di dusun yang letaknya berjauhan dengan letak BUMDes Kilu Angkon.

Namun BUMDes kilu angkon juga sudah berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapat pekerjaan dapat bekerja di BUMDes, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Sukaraja Ulu Krui dengan memberikan lapangan pekerjaan, seperti keterangan salah satu warga yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Saya merupakan masyarakat desa yang sudah selesai sekolah dan sudah hampir 4 bulan bekerja di BUMDes saya merasa terbantu dengan adanya BUMDes, karna saya bisa bekerja di BUMDes ini selagi saya melamar pekerjaan.”⁹⁷

Dapat kita ketahui peran yang diberikan BUMDes kilu angkon dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dari hampir 2 tahun

⁹⁶ Burnawan, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 13 April 2019.

⁹⁷ Yudin, Karyawan BUMDes Kilu Angkon, *Wawancara*, 13 April 2019.

berjalannya BUMDes hanya sebanyak 3 orang saja masyarakat desa yang dapat bekerja di BUMDes mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.

Adapun peran BUMDes Kilu Angkon terhadap peningkatan PAD Desa Sukaraja Ulu Krui. Tidak hanya kepada masyarakat, peran yang diberikan BUMDes Kilu Angkon bagi PAD Desa Sukaraja Ulu Krui pun masih kurang. Seperti keterangan Bapak Edi Furqon yang merupakan ketua BUMDes Kilu Angkon menjelaskan bahwa peran yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun.

Namun pada kenyatannya peran yang di berikan BUMDes Kilu Angkon terhadap PAD Desa Sukaraja Ulu Krui pada tahun 2018 hanya sebesar 7% saja ini dikarenakan BUMDes Kilu Angkon masih dalam tahap pengembangan dan juga pengurus maupun pemerintah desa memfokuskan kepada pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes maupun membuka unit usaha yang baru yang belum ada. Khairul Anwar yang merupakan bendahara Desa Sukaraja Ulu Krui menerangkan bahwa, BUMDes telah dapat berperan terhadap PAD Desa hanya saja perannya belumlah besar atau belum maksimal seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Peran yang diberikan BUMDes pada tahun 2018 hanya sebesar 7% saja sedangkan pada tahun sebelumnya BUMDES belum dapat berkontribusi terhadap PAD Desa Sukaraja Ulu Krui.”⁹⁸

⁹⁸ Khairul Anwar, Bendahara Desa Sukaraja Ulu Krui, *Wawancara*, 14 April 2019.

Disisi lain, usaha BUMDes dalam memberikan pengetahuan tentang penyuluhan pertanian kepada masyarakat sudah dilakukan hanya saja belum maksimal, seperti penjelasan Bapak Edi Furqon selaku ketua BUMDes, menuturkan bahwa:

“Kami mengadakan penyuluhan itu 2 kali dalam setahun namun seharusnya adalah 3 kali dalam setahun tapi karena kurangnya biaya kami untuk mendatangkan pemateri-pemateri yang handal, disini kami hanya menyediakan fasilitas untuk audiens dan pemateri karena pematerinya langsung dari dinas pertanian.”⁹⁹

Selanjutnya peran BUMDes terhadap Peminjaman modal yang merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 4 bulan saja. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu peminjam modal menerangkan bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut telah mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“Saya memiliki usaha jual beli damar kecil-kecilan ini dari sebelum adanya BUMDes, dan kemarin saya ingin mengembangkan usaha saya, dan saya mengajukan pinjaman untuk usaha saya ke BUMDes dan setelah saya mengembangkan usaha saya pendapatan saya meningkat”¹⁰⁰

Dengan adanya peminjaman modal pada BUMDes Kilu Angkon ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal

⁹⁹ Edi Furqon, Ketua Bumdes Kilu Angkon, *Wawancara*, 14 April 2019.

¹⁰⁰ Yasir Rahman, Peminjam Modal Bumdes Kilu Angkon, *Wawancara*, 13 April 2019.

di BUMDes Kilu Angkon ini dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha.

Dari keterangan-keterangan diatas peran yang diberikan BUMDes cukup baik, hanya saja perannya belum maksimal seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal di BUMDes sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh masyarakat yang meminjam modal saja, tidak hanya itu kontribusi BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sukaraja Ulu Krui dirasa masih belum maksimal.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui

Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun

2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Klasifikasi jenis unit usaha BUMDes sebagai berikut:

1. BUMDes *Brokering*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

BUMDes *Brokering* merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka kepasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contohnya seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp dan lain sebagainya. Jenis usaha Brokering ini telah ada pada BUMDes Kilu Angkon seperti adanya pelayanan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan penyuluhan mengatasi hama padi untuk meningkatkan hasil panen padi.

Pelatihan pembuatan kerajinan tangan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wanita khususnya ibu rumah tangga, sehingga mereka bisa mempunyai keahlian yang bisa ditingkatkan serta dapat menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pelatihan

pembuatan kerajinan tangan ini berbahan dasar bekas minuman berkemasan gelas yang kemudian dapat dikreasikan menjadi berbagai jenis kerajinan seperti wadah tisu, pass bunga, wadah minuman dan lain sebagainya. Hasil kerajinan tangan ini dijual dengan harga Rp.150.000/unit untuk wadah tisu, Rp.180.000/unit untuk pass bunga dan Rp.230.000/unit untuk wadah minum kemasan gelas yang berisi 6 atau setengah lusin. Hasil penjualan kerajinan tangan untuk wadah tisu bisa mencapai Rp.750.000/bulan, sedangkan untuk pass bunga bisa mencapai Rp.900.000/bulan dan untuk wadah minum bisa mencapai Rp.1.610.000/bulan.

Ibu Hasnah selaku masyarakat yang menjaga BUMDes Kilu Angkon juga menjelaskan bahwa penghasilan dari unit usaha ini bisa mencapai Rp.3.260.000 tetapi belum masuk perhitungan bersih karna harus dipotong untuk gaji karyawan, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Biasanya perbulan dari hasil penjualan kerajinan tangan ini bisa mencapai Rp.3.260.000 ini belum keuntungan bersih buat BUMDes karna masih harus dipotong untuk gaji karyawan.”¹⁰¹

2. BUMDes *Trading*

BUMDes Trading merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit

¹⁰¹ Hasnah, Karyawan BUMDes Kilu Angon, *wawancara*, 10 April 2019.

usaha ini mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa.

Di BUMDes Kilu Angkon belum terdapat jenis usaha ini dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan karena dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes yaitu bapak Edi Furqon, beliau menjelaskan bahwa:

“BUMDes *trading* belum ada ataupun belum diterapkan di BUMDes Kilu Angkon, karena kami rasa sudah banyak unit-unit usaha yang menyediakan kebutuhan pokok maupun sarana produksi pertanian karena memang rata-rata penduduk disini adalah petani jadi mereka pun antusias untuk membuka usaha tersebut sehingga pihak BUMDes tidak perlu membuka usaha di bidang ini lebih baik buka usaha yang memang belum ada di desa ini.”¹⁰²

Dari hasil penjelasan beliau, dapat kita ketahui bahwa pada BUMDes Kilu Angkon tidak menjalankan usaha *trading* ini dirasa karena sudah banyak unit-unit usaha yang menyediakan kebutuhan pokok maupun sarana produksi pertanian sehingga pengurus BUMDes Kilu Angkon lebih memprioritaskan kepada pengembangan unit usaha yang sudah ada maupun membentuk unit usaha yang dirasakan lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa tetapi belum ada di desa tersebut seperti pasar desa.

3. BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving* mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air

¹⁰² Edi Furqon, pengurus BUMDes, wawancara, 11 April 2019.

bersih dengan wadah BUMDes atau PAMDes. Karena itu pengelolaan air bersih oleh BUMDes merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan pengelolaan dari masyarakat yang anonim kepada desa. Kehadiran BUMDes itu melahirkan otoritas dan tata kelola air bersih yang di gerakkan oleh desa. Di Desa Sukaraja Ulu Krui jenis usaha BUMDes model *Serving* ini belum diterapkan, dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan, karena dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes yaitu bapak Edi furqon , beliau menjelaskan bahwa:

“BUMDes *Serving* belum ada ataupun belum diterapkan di BUMDes Kilu Angkon, karena kami merasa ketersediaan air bersih di desa ini masih terbilang cukup, jadi kami lebih memfokuskan kepada unit usaha yang lain.”¹⁰³

Dari hasil penjelasan beliau, dapat kita ketahui bahwa pada BUMDes Kilu Angkon tidak ataupun belum menjalankan usaha *Serving* ini dirasa karena ketersediaan air bersih di Desa Sukaraja Ulu Krui masih terbilang cukup baik sehingga pengurus BUMDes Kilu Angkon lebih memprioritaskan kepada pengembangan unit usaha yang sudah ada maupun membentuk unit usaha yang dirasakan lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa.

4. BUMDES *Renting*

BUMDES *Renting* adalah BUMDES yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus

¹⁰³ Edi Furqon, pengurus BUMDes, *wawancara*, 11 April 2019.

untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa yang ada di pulau Jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin molen.

Dalam BUMDes Kilu Angkon sudah terdapat unit usaha *Renting*, dan BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan dalam bentuk penyewaan perkakas pesta seperti tenda tarup, kursi dan panggung. Banyak warga desa maupun desa tetangga melakukan penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung di BUMDes Kilu Angkon ini untuk acara pernikahan, syukuran, aqiqahan, maupun khitanan dan lain-lain.

Tenda tarup, kursi dan panggung yang disewakan oleh BUMDes ini berjumlah 5 unit tenda tarup, satu set kursi (500 unit) dan satu set panggung. Penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung ini masing-masing dihitung per hari dengan biaya sewa yakni Rp.250.000/unit untuk tenda tarup, sedangkan kursi Rp.1.250.000/set, dan panggung Rp.750.000/set. Upah yang diberikan kepada pekerja untuk bongkar pasang dan pengangkutan diberikan langsung setelah selesai pekerjaannya, biasanya pekerja diberikan upah sebesar Rp.150.000 perorang. Menurut penjelasan salah satu pengurus BUMDes yaitu sekretaris BUMDes, usaha *Renting* ini menyumbang pemasukkan yang cukup besar bagi BUMDes, seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 kemarin usaha *Renting* ini menyumbang pemasukkan paling besar diantara unit usaha yang lain, yaitu kurang lebih sebesar Rp.9.000.000-11.000.000/bln karena banyaknya masyarakat sekitar maupun desa tetangga yang

melakukan penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung di BUMDes Kilu Angkon ini.”¹⁰⁴

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung ini mulai dari 4-5 kali dalam sebulan, dalam satu minggu hanya bisa satu kali penyewaan tetapi kadang juga bisa dua kali dalam seminggu.

5. BUMDes *Banking*

BUMDes *Banking* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu: bank desa atau lembaga pengkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir maupun peminjaman modal. Didalam BUMDes Kilu Angkon telah ada unit usaha *Banking*, yaitu dalam hal peminjaman modal kepada masyarakat. Ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Arlon selaku kepala unit bidang simpan pinjam beliau menjelaskan bahwa unit usaha peminjaman modal yang ada pada BUMDes ini baru berjalan satu tahun saja seperti penjelasannya sebagai berikut:

“Unit usaha peminjaman modal yang ada di BUMDes Kilu Angkon ini baru berjalan sekitar satu tahun ini, namun unit usaha peminjaman modal ini belum berjalan baik, karena disamping

¹⁰⁴ Irwan Efendi , Sekretaris BUMDes Kilu Angkon, wawancara, 11 April 2019.

keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.”¹⁰⁵

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa unit usaha peminjaman modal ini telah berjalan di BUMDes Kilu Angkon namun unit ini belum dikatakan berjalan dengan baik, karena masih terdapat berbagai kendala salah satunya yaitu terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUMDes dan juga dirasakan unit usaha ini mengandung resiko yang cukup besar sehingga pengurus BUMDes lebih memfokuskan kepada pengembangan unit usaha yang lain. Bapak Edi Furqon juga menambahkan bahwa sebanyak 6 peminjaman modal yang telah diberikan selama setahun ini oleh BUMDes kepada masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui. Peminjaman modal ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, seperti penjelasannya sebagai berikut:

“Kami telah memberikan 6 peminjaman modal kepada masyarakat desa, dengan syarat masyarakat yang meminjam harus memiliki usaha dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan BUMDes.”¹⁰⁶

Dari keterangan bapak Edi Furqon juga beliau menambahkan adapun syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin meminjam modal di BUMDes yaitu harus memiliki usaha dan juga adanya jaminan yaitu seperti surat tanah ataupun BPKB motor yang di serahkan ke BUMDes selama melakukan peminjaman. Setiap peminjaman yang dilakukan dikenakan 6% untuk BUMDes dengan waktu maksimal tempo

¹⁰⁵ Arlon, Ka. Unit Simpan Pinjam Pinjam BUMDes Kilu Angkon, *wawancara*, 12 April 2019.

¹⁰⁶ Edi Furqon, Ketua BUMDes Kilu Angkon, *wawancara*, 12 April 2019.

selama 4 bulan, pengenaan 6% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan peminjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh. Tidak hanya itu bapak Edi Furqon juga menjelaskan bahwa modal yang dipinjamkan juga maksimal hanya Rp.3.000.000. Unit peminjaman modal ini belum dapat dikatakan berkontribusi besar bagi pendapatan BUMDes dari 6 peminjaman modal yang diberikan oleh BUMDes hanya sekitar Rp.1.000.000 yang didapat oleh BUMDes. disamping keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUMDes Kilu Angkon ini sudah cukup lengkap yakni sudah ada BUMDes *Banking*, *Brokering*, maupun *Renting*. Namun didalam BUMDes Kilu Angkon ini belum ada BUMDes *Serving* dan *trading* dari unit-unit usaha yang ada pada BUMDes ini unit usaha *Renting* yang menyumbang pemasukkan paling besar untuk BUMDes lalu unit usaha *Brokering* yang dianggap telah berjalan dengan baik dan banyak peminatnya khususnya kaum wanita, sedangkan unit usaha *Banking* masih terus mengalami perkembangan, karena dapat kita ketahui unit usaha *Banking* masih memiliki beberapa kendala yaitu keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes.

Setelah peneliti paparkan mengenai klasifikasi unit usaha yang ada pada BUMDes berdasarkan teori, peneliti juga ingin menghubungkan unit-unit usaha tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa

Sukaraja Ulu Krui. Menurut Todaro dan Stephen Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:¹⁰⁷ *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial individu dan bangsa. Terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya, yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- 1) Tinggi (Rp.5.000.000)
- 2) Sedang (Rp.1.000.000-Rp.5.000.000)
- 3) Rendah (<Rp.1.000.000)

Sebagian besar masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui berprofesi sebagai petani, jumlah petani saat ini adalah sekitar 233 orang yang

¹⁰⁷ Todaro, Michael P, dan Stephen, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.305.

didominasi dengan petani padi maupun sayuran. Selain petani Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui memiliki pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), peternak, pengrajin, pedagang, karyawan, bidan dan lain sebagainya.

Banyak dari para petani yang juga memiliki usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi, tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan warga Desa Sukaraja Ulu Krui yakni Bapak Burhan yang tidak bergabung didalam unit usaha BUMDes, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya seorang petani, penghasilan saya dari tani cukup untuk makan kami berempat, saya, istri saya dan dua lagi anak saya, dan juga dibantu oleh anak saya yang lain yang telah menikah mereka sering mengirim uang untuk membantu keperluan kami disini”¹⁰⁸

Sedangkan menurut penjelasan dari Masyarakat Desa yang lain yaitu Ibu Juwairiyah ialah sebagai berikut:

“Pekerjaan suami saya seorang petani, dulunya saya membantu bapak diladang tetapi semenjak punya anak yang keempat ini saya dirumah saja mengurus anak saya, penghasilan bapak dari bertani tidak banyak hanya cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Burhan, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 13 April 2019.

¹⁰⁹ Juwairiyah, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 14 April 2019

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan-informan yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui sebagian besar masyarakat penghasilan perbulannya berkisar Rp.500.000-Rp.700.000 yaitu kurang dari Rp.1.000.000, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sukaraja Ulu Krui ini adalah sebagai petani. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatannya rendah. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang berpendapatan sedang perbulannya, seperti penjelasan salah satu masyarakat yaitu Ibu Marni selaku masyarakat desa yang tidak berperan aktif dalam BUMDes juga menjelaskan bahwa:

“Saya hanya ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai kuli bangunan, meskipun tidak berlebihan Alhamdulillah pendapatan dari suami saya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami.”¹¹⁰

Tidak hanya itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam unit usaha BUMDes yakni peminjaman modal salah satunya bapak suryo, ia menjelaskan bahwa:

“Usaha saya steam motor didepan rumah, dulu saya kekurangan modal dan memutuskan meminjam modal di BUMDes, setelah saya melakukan peminjaman modal tersebut Alhamdulillah pendapatan saya meningkat yang tadinya hanya maksimal Rp.1.000.000 kini bisa dapat Rp.1.400.00 bahkan bisa lebih.”¹¹¹

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDes Kilu Angkon ini belum memiliki peran yang lebih dalam

¹¹⁰ Marni, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, wawancara, 14 April 2019.

¹¹¹ Suryo, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, wawancara, 14 April 2019.

meningkatkan pendapatan masyarakat dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah yakni <Rp.1.000.000. Namun bagi masyarakat yang melakukan peminjaman modal di BUMDes pendapatannya meningkat yaitu dari Rp.1.000.000 menjadi Rp.1.400.000 bahkan bisa lebih. Ini menunjukkan adanya ketimpangan didalam masyarakat dalam hal pendapatan. Ini berarti meskipun pemerintah Desa telah membentuk lembaga perekonomian untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya, tetapi ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan masyarakatnya terlebih bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam unit usaha BUMDes. Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Pendapatan masyarakat desa Sukaraja Ulu Krui ini sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya namun belum sampai tahap menyisihkan uang untuk saving atau menabung bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

b. Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran masyarakat di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Proporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk

menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga.

Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Disinilah peran BUMDes Kilu Angkon unit sektor riil sangat membantu masyarakat, dimana masyarakat khususnya kaum wanita bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang diadakan oleh BUMDes Kilu Angkon. Seperti keterangan salah seorang masyarakat Desa sebagai berikut:

“Dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang diadakan oleh BUMDes Kilu Angkon alhamdulillah saya bisa punya kerjaan sampingan selain jadi petani untuk dapat menambah penghasilan sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari.”¹¹²

Tidak hanya terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di BUMDes Kilu Angkon juga mengadakan penyuluhan

¹¹² Rohim, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 15 April 2018.

mengatasi hama padi untuk meningkatkan hasil panen padi sehingga dapat meningkatkan hasil panen padi para petani. Seperti keterangan salah satu warga menjelaskan bahwa:

“Sebelum ada BUMDes ini dulu hasil panen hampir selalu gagal karna kami tidak tahu cara mengatasi hama tapi setelah diadakan penyuluhan pertanian oleh BUMDes Kilu Angkon ini alhamdulillah hasil panen padi maupun sayuran kami meningkat.”¹¹³

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terlihat bahwa BUMDes Kilu Angkon ini berperan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya kelompok tani untuk bisa meningkatkan hasil panen mereka setiap tahunnya, dengan unit usaha sektor riil ini juga masyarakat bisa punya keterampilan sehingga bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP, serta sebagian yang lainnya hanya sampai ditingkat berpendidikan SD, dan ada pula yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah. Selain itu jika dilihat dari data yang terkait di

¹¹³ Seniwati, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 15 April 2018.

Desa Desa tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada pula. Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah di Desa Sukaraja Ulu Krui ini secara keseluruhan bersekolah semua, meskipun hanya ada sampai kejenjang SMA saja, seperti diterangkan sebagai berikut:

“Alhamdulillah semua anak ibu bersekolah semua, dulu anak pertama sampai SMP saja, yang kedua sampai SMP juga dan yang terakhir ini masih SMA.”¹¹⁴

Selain itu, dari penjelasan masyarakat yang lain menerangkan bahwa pendidikan yang dijalani oleh anak-anaknya sampai kejenjang SMA seperti pada penjelasannya sebagai berikut:

“Anak bapak semuanya Alhamdulillah sampai lulus SMA semua, anak kedua masih SMP yang bungsu baru umur 2 tahun, ya kalau ada rezeki dan dibantu kakaknya insyaallah yang nomor dua ini mau lanjut keperguruan tinggi.”¹¹⁵

Dari jawaban masyarakat Desa diatas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Sukaraja Ulu Krui terbilang sudah cukup baik, meskipun masyarakat menerapkan pendidikan minimal 9 tahun namun ada yang melanjutkan kejenjang SMA bahkan perguruan tinggi meskipun tidak banyak. Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mensejahterakan masyarakat

¹¹⁴ Raudoh, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 15 April 2019.

¹¹⁵ Karman, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 15 April 2019.

dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat mengatasi kemiskinan masyarakat desa tersebut dengan ilmu yang dimiliki.

Dalam hal ini BUMDes Kilu Angkon belum banyak mendorong pendidikan tinggi bagi masyarakat, karena operasional lembaga perekonomian yang telah lahir dua tahun ini masih sangat kurang bahkan dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja. Unit usaha yang dikelola BUMDes belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu, tingkat pendidikan khususnya anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat), sedangkan yang masuk perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari. Kesehatan Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui secara umum cukup baik, sudah ada posyandu dimasing-masing dusun, puskesmas dan juga sudah ada praktik bidan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukaraja Ulu Krui kesehatan masyarakat di desa ini cukup baik tidak ada

menunjukkan angka terkena gizi buruk. Seperti yang dijelaskan beliau berikut:

“Kesehatan Masyarakat disini cukup baik, dengan didukung adanya puskesmas, posyandu maupun praktek bidan. Dan juga di Desa Sukaraja Ulu Krui ini telah menerapkan program berencana (KB). Hanya saja kami selaku pemerintah desa terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui ini agar kesehatan masyarakat disini berkembang lebih baik lagi.”¹¹⁶

Dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, sarana kesehatan di Desa Sukaraja Ulu Krui ini cukup tersedia, kebutuhan akan obat-obatan masyarakat juga tersedia di puskesmas maupun warung. Kecuali bila memiliki penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter. Namun begitu fasilitas yang dirasakan masih kurang dan terus mengalami perbaikan. Dalam hal kesehatan BUMDes Kilu Angkon tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, melihat tingkat kesehatan masyarakat Sukaraja Ulu Krui sendiri sudah cukup baik.

e. Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah

¹¹⁶ Ahkyaruddin, Kepala Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 12 April 2019

luas lantainya lebih dari 10m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Tingkat perumahan masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui dilihat dari indikator yang ada sudah 90% rumah masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui sudah hak milik sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang bukan milik sendiri atau dapat dikatakan menyewa rumah. Keadaan rumah yang berkualitas atau disebut dengan rumah permanen sebanyak 112 rumah, semi permanen 125 rumah dan rumah non permanen sebanyak 50 rumah sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun beliau menerangkan bahwa:

“Kebanyakan rumah masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui ini adalah milik sendiri yang menyewa hanya sebagian kecil saja. Begitu juga dengan penerangan listrik, di Desa Sukaraja Ulu Krui penerangan listriknya sudah merata disetiap rumah masyarakat.”¹¹⁷

Selain itu secara umum masyarakat di Desa Sukaraja ulu krui telah memiliki MCK dirumahnya meskipun masih ada warga atau masyarakat yang MCK nya kurang memadai dan perlu peninjauan kembali serta perlu adanya bantuan pemerintah untuk pengadaan MCK umum.

Semua penjabaran umum berdasarkan indikator dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai lembaga perekonomian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukaraja Ulu Krui, bahwa peran dari BUMDes Kilu Angkon masih belum maksimal dalam membantu

¹¹⁷ Mustika, Kadus 04 Desa Sukaraja Ulu Krui, wawancara, 11 April 2019.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata dikalangan masyarakat masih banyak terdapat ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK yang belum merata dan terpenuhi. Ketimpangan lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai keramik, namun masih ada juga yang rumahnya hanya berdinding kayu ataupun papan. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah yaitu >Rp.1.000.000, tingkat pendidikan keperguruan tinggi yang masih sangat rendah, dalam fasilitas material ini masih harus dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik. Jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator masih banyak yang belum terpenuhi dengan baik seperti pendapatan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat yang masih rendah, fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi seperti MCK umum bagi masyarakat, maupun sarana kesehatan yang dirasa masih kurang.

Peran BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui ini masih dirasa kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih sangat rendah. Walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa yang mempunyai sasaran yaitu

terlayannya masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya dilapangan khususnya di Desa Sukaraja Ulu Krui ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian serta tujuannya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi didalam lembaga tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi Furqon selaku Ketua BUMDes Kilu Angkon menerangkan bahwa:

“Pengurus BUMDes menemukan beberapa kendala dalam menjalankan BUMDes salah satunya kurangnya modal yang dimiliki BUMDes Kilu Angkon ini sehingga membuat gerak kami terbatas dalam menegembangkan unit usaha. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk terus lebih baik.”¹¹⁸

Tidak hanya kendala yang berasal dari BUMDes sendiri, faktor lain yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes yaitu berasal dari masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui itu sendiri seperti yang di terangkan oleh salah satu warga, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tau ada BUMDes di Desa ini tapi saya tidak tau apa saja unit usahanya setau saya hanya ada penyewaan perkakas pernikahan saja karna beberapa bulan lalu ada tetangga yang menyewa dari BUMDes itu.”¹¹⁹

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kendala yang dihadapi BUMDes Kilu Angkon ini tidak hanya berasal dari BUMDes itu saja yaitu kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes maupun manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik

¹¹⁸ Edi Furqon, Ketua BUMDes Kilu Angkon , *wawancara*, 12 April 2019.

¹¹⁹ Zainiri, Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui, *wawancara*, 13 April 2019.

tetapi kendala juga berasal dari masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes Kilu Angkon dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes. Oleh karena itu, harus adanya koordinasi yang baik antar pengurus BUMDes Kilu Angkon dan pemerintah desa serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMDes Kilu Angkon sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengatasi kemiskinan dan penganggurannya. Pengurus BUMDes Kilu Angkon juga harus memiliki strategi untuk menarik minat masyarakat agar bersama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Sukaraja Ulu Krui ini sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui masuk dalam kategori keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan dan interaksi dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Kilu Angkon) dalam mengentaskan kemiskinan terhadap masyarakat dirasa masih kurang maksimal. Tetapi meskipun peran BUMDes Kilu Angkon belum maksimal, pengurus BUMDes optimis bisa memaksimalkan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes. Walaupun belum maksimal bukan berarti unit usaha tersebut

memiliki dampak negatif hanya saja perlu adanya pengelolaan yang baik dari pengelola unit usaha tersebut dan juga perhatian serta pengawasan yang lebih baik lagi agar unit usaha ini dapat berkembang. Namun jika dilihat kondisi Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui sebelum diterapkannya BUMDes jumlah keluarga prasejahtera masih tinggi, walaupun tingkat kemiskinan setiap tahun menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDes dan diterapkan di Desa Sukaraja Ulu Krui, kondisi masyarakat mulai ada perubahan. pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat. Misalnya pengembangan usaha steam motor melalui unit usaha peminjaman modal. Dengan demikian pengangguran di Desa Sukaraja Ulu Krui sedikit berkurang, tidak hanya itu perubahan yang dirasakan juga pada kaum wanita khususnya ibu rumah tangga yang diberdayakan oleh BUMDes melalui pelatihan pembuatan kerajinan tangan sehingga ibu-ibu bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, serta penyuluhan hama padi untuk meningkatkan hasil panen padi di Desa Sukaraja Ulu Krui.

B. Pola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Kilu Angkon) Di Desa Sukaraja Ulu Krui.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan membentuk suatu badan yang berorientasi untuk masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat akan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Lembaga Ekonomi yang ada dimasyarakat menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa

mengatasi kemiskinan masyarakat desa. Lembaga Ekonomi ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan lembaga Ekonomi tersebut. Salah satunya program yang sedang gencar dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak peningkatan ekonomi desa. BUMDes ini meliputi sektor moneter dan sektor riil.

BUMDes merupakan satu badan usaha yang telah menyebar di berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung salah satunya BUMDes telah hadir di Kabupaten Pesisir Barat. Disini telah banyak desa yang memiliki BUMDes salah satunya di Desa Sukaraja Ulu Krui, BUMDes ini berdiri pada 04 April 2016, dengan SK Kepala Kampung No:001/SK/VII.12.14/VII/2016 tentang BUMDes Kilu Angkon.

Tujuan didirikannya BUMDes Kilu Angkon selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki tetapi juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Kilu Angkon:

1. Unit Usaha Bidang Konstruksi

Bentuk usaha bidang konstruksi berupa penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung yang masing-masing berjumlah 5 unit tenda tarup, satu set kursi (500 unit) dan satu set panggung. Penyewaan bidang konstruksi masing-masing terhitung per hari dengan biaya sewa yakni Rp.250.000/unit untuk tenda tarup, sedangkan kursi Rp.1.250.000/set, dan panggung Rp.750.000/set. Keseluruhan dari pendapatan ini

merupakan pendapatan kotor karna masih harus dibagi untuk pekerja pemasang alat konstruksi tersebut. Setelah dibagi untuk pekerja kemudian pendapatan ini disetor ke BUMDes sudah termasuk pendapatan bersih. Dengan proses pengambilan maupun pengembalian ditanggung oleh pihak BUMDes.

2. Unit Usaha Bidang Jasa Pelayanan (Sektor Riil)

3) Pelatihan pembuatan kerajinan tangan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wanita khususnya ibu rumah tangga. BUMDes Kilu Angkon mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan berbahan dasar bekas minuman berkemasan gelas yang kemudian dapat dikreasikan menjadi berbagai jenis kerajinan seperti wadah tisu, pass bunga, wadah minuman dan lain sebagainya. Pelatihan ini diberikan agar kaum wanita mempunyai keahlian sehingga bisa dikembangkan. Program pelatihan pembuatan kerajinan tangan diharapkan mampu menambah pendapatan kaum wanita desa sukaraja ulu krui disamping bekerja sebagai petani dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga. Hingga saat ini masyarakat yang mengikuti pelatihan ini selalu bertambah banyak. Pembuatan kerajinan ini cukup sulit dan memerlukan ketelatenan sehingga diharapkan masyarakat agar dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena dengan mempunyai keterampilan maka kualitas sebagai perempuan akan lebih baik. Pelatihan kerajinan tangan ini sudah berjalan

kurang lebih 2 tahun yakni dari tahun 2016-2018. Kegiatan ini diadakan oleh Perangkat Desa Sukaraja Ulu Krui dan pengurus BUMDes Kilu Angkon.

4) Penyuluhan pertanian

Penyuluhan yang diadakan oleh BUMDes Kilu Angkon meliputi penyuluhan pemberantasan hama padi, jagung, pemupukan, pemanenan dan lain-lain. Penyuluhan pertanian dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun dan pementeri nya dari dinas pertanian. Kegiatan ditujukan untuk semua masyarakat khususnya petan,. Program ini sangat didukung oleh pemerintah Desa Sukaraja Ulu Krui. Harapannya petani di Desa Sukaraja Ulu Krui mampu mengetahui solusi untuk membasmi hama sehingga hasil panen meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Program ini bekerjasama dengan anggota kelompok tani yang ada di Desa Sukaraja Ulu Krui. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungan. Selanjutnya mereka didorong untuk melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan.

3. Unit Usaha Peminjaman Modal BUMDes Kilu Angkon

Pada unit usaha peminjaman modal bumdes memberikan pinjaman berupa modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes adalah dana yang terkumpul dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Dana pinjaman yang diberikan maksimal Rp3.000.000. Setiap peminjaman yang dilakukan dikenakan bunga 6% untuk BUMDes dengan waktu maksimal tempo selama 4 bulan, pengenaan 6% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan peminjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh. Namun unit usaha peminjaman modal ini belum berjalan baik, karena disamping keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDes dirasa mengandung resiko yang cukup besar.

Berdasarkan teori yang telah peneliti paparkan di bab II tentang prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut:¹²⁰

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes Kilu Angkon telah mampu melakukan kerjasama yang baik, dapat dilihat dari setiap unit usaha yang telah dijalankan, dimana dalam setiap unit usaha tersebut telah terjalin suatu sistem kerjasama antara BUMDes Kilu Angkon dengan Masyarakat.

¹²⁰ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 20

- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes Kilu Angkon telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan BUMDes tersebut. Dapat dilihat dari kesukarelaan dan ketersediaan para anggota yang mau menjalankan unit-unit usaha BUMDes Kilu Angkon.

- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Tidak ada perlakuan khusus terhadap semua komponen yang terlibat dalam BUMDes Kilu Angkon tersebut tanpa memandang golongan, suku dan agama.

- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh anggota BUMDes Kilu Angkon kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya unit-unit kegiatan yang terdapat dalam BUMDes Kilu Angkon serta tujuannya.

- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

BUMDes Kilu Angkon belum menjalankan pembukuan secara teknis sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai administrasi keuntungan dan kerugian dalam setiap unit kegiatan, sesuai wawancara kepada bapak robby selaku bendahara BUMDes Kilu Angkon menjelaskan bahwa tidak adanya pembukuan karena di BUMDes ini kurang SDM yang handal setiap pemuda/i disini yang lulusan perguruan tinggi tidak mau tinggal di Desa rata-rata merantau alasannya kalau tinggal dikampung gajinya kecil jadi kurang mencukupi, minimal kerja di bank mereka baru mau tinggal di Desa.¹²¹

- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Masyarakat kurang berperan aktif dalam pengembangan usaha dan pembentukan unit usaha BUMDes kilu angkon karena kurangnya minat masyarakat untuk bergabung dengan BUMDes tersebut, terlebih para pemudanya. Alasan pemuda enggan bergabung dalam BUMDes karena BUMDes dianggap belum bisa menjadi usaha yang bisa menjamin masa depan mereka, salah satunya sulit mendapatkan pendapatan besar, pendapatanya hanya cukup untuk makan sehari-hari tidak cukup jika untung menabung.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwasannya dalam pengelolaannya BUMDes Kilu Angkon belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan, dikarenakan kurangnya

¹²¹Robby, Bendahara BUMDes Kilu Angkon, *Wawancara*, 14 April 2019.

transparansi atau sosialisasi BUMDes Kilu Angkon kepada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya unit-unit kegiatan dan tujuan BUMDes yang berakibat kurangnya minat dari masyarakat untuk bergabung maupun mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam BUMDes. Kemudian BUMDes Kilu Angkon juga belum akuntabel dikarenakan belum memiliki pembukuan karena kurangnya SDM yang handal dalam BUMDes Kilu Angkon yang mampu menyusun pembukuan.

C. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman modal, pelatihan pembuatan kerajinan tangan serta penyuluhan hama padi untuk meningkatkan panen padi, jasa pelayanan maupun penyewaan tenda tarup, kursi dan panggung yang sedikit banyak BUMDes ini telah berperan bagi masyarakat meskipun belum maksimal. Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes telah memberikan bantuan

atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan sehingga dapat mengurangi kemiskinan masyarakatnya, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan Sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Demikian juga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadillah (58) : 11 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDes memang banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui. Namun dapat kita ketahui pengelolaan BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui ini dapat dikatakan masih dikelola secara konvensional. Dapat kita ketahui pada unit usaha peminjaman modal adanya pemotongan diawal sebesar 6% dari peminjaman modal yang dilakukan ini tentu bertentangan dengan ekonomi islam. Karena termasuk transaksi riba dan sudah jelas didalam islam tidak memperbolehkan adanya transaksi demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-baqarah (2) : 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sangat mengharamkan riba dan melakukan riba ialah termasuk dosa besar. Karena di

dalam ekonomi islam, islam hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil. Sistem ekonomi bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan solusi dalam perekonomian islam, yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang kita kerjakan tidak akan merugikan orang lain dan akan membawa kemaslahatan bagi usaha kita dan bagi orang lain. Prinsip dasar etika islami dan prakteknya dalam bisnis yaitu:¹²²

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan

¹²² Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9 No 1

masyarakat banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial. Prakteknya dalam bisnis:

- a. Terdapat kesamaan perlakuan
- b. Kesamaan hak kompensasi
- c. Tidak adanya pihak yang dirugikan

Dalam hal ini BUMDes telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDes memberikan perlakuan yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, contohnya saja setiap masyarakat dapat bergabung atau ikut serta dalam unit usaha BUMDes salah satunya yaitu penyewaan tenda tarup, kursi serta panggung, siapapun bisa melakukan peminjaman di BUMDes Kilu Angkon dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan dalam aktivitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis:

- a. Adanya keselarasan antara urusan bisnis dan urusan akhirat seperti kebebasan beribadah.
- b. Melakukan keseimbangan antara usaha dan lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini juga BUMDes telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, salah satunya yaitu masyarakat Desa Sukaraja Ulu

Krui memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang mereka yakini tidak ada yang menghalangi orang lain menjalankan praktek ibadahnya, selama tidak ada unsur penistaan agama lain di dalamnya.

3. *Responsibility* (tanggung jawab)

Merupakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip tanggungjawab menurut Said Quth adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bisnisnya adalah:

- a. Upah harus sesuai
- b. Pemberian upah harus tepat waktu

Jika kita lihat berdasarkan prinsip ekonomi islam BUMDes dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Dalam prakteknya BUMDes Kilu Angkon disini memberikan upah tepat waktu kepada pengurus BUMDes yaitu dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan jumlah atau nominal yang telah ditetapkan dan disepakati BUMDes. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa sukaraja ulu krui telah memenuhi prinsip bekerja dalam islam.

Masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui terlihat begitu jelas bahwa mereka adalah pekerja keras untuk bisa menghidupi keluarganya mereka rela bekerja apa saja, dapat dilihat pada tabel mata pencarian pokok

masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui pada bab III yakni berjumlah 233 orang petani artinya mereka memang benar-benar pekerja keras.

Kewajiban berusaha dan bekerja bagi umat Islam juga tercantum dengan jelas dalam firman Allah dalam Surat At- Taubah (10) : 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS.At-Taubah:105)

Dalil tersebut menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bekerja, dan Allah pasti akan membalas apa yang telah dikerjakan. Allah akan menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation. Bekerjalah karena Allah semata dengan amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk individu atau untuk masyarakat umum, maka Allah akan memberi ganjaran untuk amalan yang dikerjakan. Dengan demikian, Islam tidak hanya memandang bekerja adalah untuk keperluan material saja akan tetapi juga untuk kepentingan rohaniah manusia, karena tujuan dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan dunia lebih dari itu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itu Islam memberikan

petunjuk serta prinsip tidak menyalahi aturan dalam bekerja, dan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

1) Kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*)

Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.

a) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang penting untuk terpenuhi karena dalam beraktifitas manusia membutuhkan sandang atau pakaian untuk berpergian.

Berdasarkan temuan di lapangan secara keseluruhan masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan sandangnya, sebagian dari mereka mengaku membeli baju baru 1 kali setiap tahun.

b) Kebutuhan Pangan/ Makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan harus terpenuhi, karena manusia untuk bertahan hidup dan menjalani semua aktifitas kesehariannya harus memenuhi kebutuhan akan makan setiap harinya.

Berdasarkan data lapangan yang didapat, diketahui bahwa pola makan masyarakat sudah memenuhi standar yaitu makan sebanyak 3 kali sehari dan mengonsumsi susu/daging/ayam/ikan 2 kali atau lebih dalam satu bulan.

c) Tempat Tinggal

Rumah merupakan hal yang penting dalam sebuah keluarga sebagai tempat berlindung setiap harinya. Berdasarkan temuan di lapangan mayoritas masyarakat sudah menghuni rumah sendiri, selain itu kondisi rumah yang sudah ditembok plester dan luas yang sudah memenuhi kategori layak huni yaitu $8m^2$ untuk setiap satu anggota keluarga dan jenis lantai yang sudah disemen bahkan dikeramik.

Berdasarkan data yang didapat tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat sudah dikategorikan mampu.

d) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan dimana jiwa dan raga seseorang dalam keadaan yang baik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Masyarakat di desa sukaraja ulu krui sudah peduli akan kesehatan dirinya dan keluarganya, karena sebagian masyarakat mengatakan setiap ada yang sakit langsung dibawa ke puskesmas terdekat.

e) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan serta pengetahuan seseorang yang akan berdampak terhadap perbaikan taraf hidup seseorang.

Berdasarkan temuan di lapangan hampir keseluruhan anak di desa sukaraja ulu krui mengenyam pendidikan formal.

2) Kebutuhan sekunder (*Al-hajiyat*)

Kebutuhan sekunder juga penting dalam menunjang pemeliharaan 5 tujuan syariat, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kesemua masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan akan penerangan, karena semua rumah mereka sudah dialiri arus listrik yang dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari.

3) Kesempurnaan (*Tahsiniyat*)

Kesempurnaan atau kebutuhan tersier berguna sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan sekunder. Menurut sebagian masyarakat desa sukaraja ulu krui bila mereka memiliki uang lebih setelah terpenuhinya semua kebutuhan mereka, mereka membelanjakan uangnya untuk membeli perabotan.

Dari pemaparan diatas sebagian besar masyarakat telah dapat memenuhi keseluruhan dari kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan tiga kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat desa sukaraja ulu krui dalam kategori sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengentaskan kemiskinan perspektif Ekonomi Islam. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BUMDes Kilu Angkon dalam meningkatkan kesejahteraan telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu pelatihan pembuatan kerajinan tangan, penyuluhan pertanian, peminjaman modal dan unit usaha konstruksi yakni penyewaan tenda tarup kursi dan panggung, hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masyarakat, peran BUMDes Kilu Angkon ini masih belum dapat dikatakan maksimal, BUMDes telah dapat mengurangi kemiskinan dari tahun ke tahun namun belum signifikan dikarenakan kurangnya modal serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BUMDes Kilu Angkon walaupun mereka telah menggunakan unit usaha yang ada tetapi kesadaran partisipasi masyarakat langsung dalam menggali potensi Desa yang dimiliki masih sangat rendah, sehingga kesejahteraan di Desa Sukaraja Ulu Krui ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui.

2. Pola pengelolaan BUMDes kilu angkon belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan. BUMDes Kilu Angkon telah sesuai dengan prinsip *kooperatif*, *partisipatif* dan *emansipatif* yakni telah terjalin kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan BUMDes Kilu Angkon serta tidak memandang golongan, suku dan agama. Namun BUMDes Kilu Angkon belum sesuai dengan prinsip *transparan*, *akuntabel* dan *sustainable*, yakni masih kurangnya transparansi atau sosialisasi BUMDes Kilu Angkon kepada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya unit-unit kegiatan dan tujuan BUMDes yang berakibat kurangnya minat dari masyarakat untuk bergabung maupun ikut mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam BUMDes. Kemudian BUMDes Kilu Angkon juga belum akuntabel dikarenakan belum memiliki pembukuan karena kurangnya SDM yang handal dalam BUMDes Kilu Angkon yang mampu menyusun pembukuan.
3. Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan penyewaan tenda tarup kursi dan panggung maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri

yaitu untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahsinniyyah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
2. Untuk pengurus BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDes Kilu Angkon untuk lebih memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya agar peran BUMDes terhadap masyarakat pun meningkat. Pihak BUMDes perlu mengadakan sosialisasi formal maupun informal seperti iklan, penyebaran spanduk, dan lain sebagainya, agar masyarakat mengetahui unit kegiatan BUMDes maupun tujuan BUMDes itu sendiri sehingga masyarakat tergugah untuk bergabung memanfaatkan dan mengembangkan unit usaha BUMDes Kilu Angkon.
3. Bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kilu Angkon baik dalam bentuk material maupun non material, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja

BUMDes Kilu Angkon. Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.

4. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDes Kilu Angkon untuk meningkatkan kehidupan ekonomi.
5. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bunghatta dan Ekonomi Islam*, Multi Press Indo, Jakarta, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004).
- Adiwarman.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Amri, Khairul, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015.
- Anwar Basri, "Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 14 No. 3, September, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Badan Pusat Statistik. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesawaran 2016/2017*, Badan Pusat Statistik, Pesawaran, 2017.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV Darus Sunnah, Jakarta Timur, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2002.

Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Edy Yusuf Agunggunanto Dkk. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Vol 13 No 1 2016.

Hadi Payitno, Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996.

Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “*Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaund*”, Journal Acta Diurnal Edisi, April, 2013.

Ibn Mansûr, Lisân al-Arab, Juz III, Dar Ilmiyah, Beirut, 2009.

Johni, Dimyati. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

Jonnius, “Analisis Kinerja Karyawan BUMDes Di Kabupaten Kampar”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.17, No.1, Januari-Juni 2014.

Kadek Sumiasih, “Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi Di Desa Pakse Bali Kabupaten Klungkung”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4, Desember 2018.

Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Mitra Wacana media, Jakarta, 2008.

Kara, Muslimin. *Pemikiran Al-Syathibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012.

M.J Kasianto, *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia* , Pt Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1994.

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul ”, *Jurnal Modus*, Vol. 28 No.2, Yogyakarta, 2016.

Moh. Pabundo Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Lantabora Press Jakarta, 2005.

Mulyitama, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha yang Islami*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2006.

Mulyitama, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship Bagaimana Menciptakan dan Membangun Usaha yang Islami*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2006.

Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

Niswatun Hasanah, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Desa

Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. *QIEMA (Qomaruddin Islami Economy Magazine)*, Vol.5 No.1, Februari, 2019.

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Penada Media Grup, Jakarata, 2011.
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Ratna Aziz Prasetyo, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Dialektika*, Vol.XI No.1, Maret, 2016.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Sardar, Ziauddin. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016.

Seyadi. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN. 2003.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Sri Kusuma Dewi, Amelia. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari 2014.

Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol 9 No 1 Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, PT.Reka Cipta, Yogyakarta, 1995.

Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012.

..... *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, CV.Alpabeta, Bandung, 2011.

Todaro, Michael P, dan Stephen, *P embangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid I*, Erlangga, Jalarta, 2006.

Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, PT.Reka Cipta, Yogyakarta, 1995.

Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Yadiati, Winwin. *Teori Akuntansi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009.

Zartika, Cica. “*Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*”, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016.

L

A

M

P

I

R

A

N





